



**PENGARUH LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP  
PENGHINDARAN PAJAK  
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang  
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016)**

Skripsi

Dibuat Oleh:

Hilda Amalia  
022114127

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS PAKUAN  
BOGOR**

**JULI 2018**



**PENGARUH LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN  
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**  
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang  
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016)

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi  
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan  
Bogor

Hilda Amalia  
022114127



Dekan Fakultas Ekonomi

(Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA.)

Ketua Program Studi

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA.,  
CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA.)

**PENGARUH LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN  
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**  
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang  
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016)

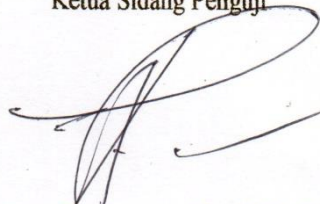
Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus  
Pada Hari : Kamis Tanggal : 26 / Juli / 2018

Hilda Amalia  
022114127

Menyetujui,

Ketua Sidang Penguji



(Monang Situmorang, Ak., M.M., CA.)

Ketua Komisi Pembimbing



(Ketut Sunarta, Ak., M.M., C.A.)

Anggota Komisi Pembimbing



(Patar Simamora, S.E., M.Si.)

## ABSTRAK

HILDA AMALIA. NPM 022114127. Pengaruh *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016). Dibawah bimbingan: KETUT SUNARTA dan PATAR SIMAMORA. 2018.

Pajak merupakan unsur yang paling penting untuk menopang anggaran penerimaan negara. Namun demikian, usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor ini bukan tanpa kendala. Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), bahkan tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Pajak bagi perusahaan merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih, dan sudah jadi rahasia umum perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) untuk mengetahui pengaruh *leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* terhadap penghindaran pajak (2) untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan yang diproksikan dengan Firm Size terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Leverage* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Leverage* dan ukuran perusahaan. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak yang diukur menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR).

Jenis penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dan menggunakan sumber data sekunder. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 43 perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2012-2016. Penentuan sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu, dan memperoleh sampel sebanyak 7 perusahaan. Data diolah menggunakan alat bantu SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) Versi 23.

Dasi Hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan untuk *Leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci : *Leverage*, Ukuran perusahaan, Penghindaran pajak

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016) ”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan. Serta tak lupa sholawat serta salam untuk junjungan alam Nabi Muhammad S.A.W

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide, maupun pemikiran. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah S.W.T yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
2. Kedua orang tua ku tercinta Ayah, Mamah dan kakak-kakak ku, Mila Agustianah, Faizal Ridwan, Taufik Hidayat dan ponakan ku Lathifia Azizah Hidayat yang sangat banyak memberikan bantuan moril, material, arahan dan selalu mendoakan keberhasilan dan keselamatan selama menempuh pendidikan.
3. Bapak Dr. H. Bibin Rubini, M.Pd. selaku Rektor Universitas Pakuan.
4. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
5. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
6. Bapak Ketut Sunarta selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi.
7. Bapak Patar Simamora, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si. selaku Sekertaris Program Studi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
9. Ibu Sri Hidajati Ramdani yang telah memberi arahan saat proses bimbingan.
10. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tidak ternilai.

11. Keluarga besar Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
12. Teman-teman kelas C Akuntansi 2014 yang tidak akan saya lupakan teman seperjuangan selama kuliah yang selalu memberikan keceriaan setiap hari selama kuliah.
13. Para sahabat saya Nurus Syayidatul Awaliyah dan Erna Purnama yang selalu menemani bimbingan dan selalu memberi arahan selama proses penulisan, Rista Nindri Arsellia yang selalu memberi arahan dan masukan selama penulis bimbingan, Berliana Rozalina Zulkarnaen dan Anisya Aulia Saraswati yang selalu ada saat berpergian, dan Feby Abriyanti Oktaviani teman seperjuangan saat magang.
14. Pada teman-teman seperjuangan saat bimbingan, Ikrimah, Srimulyati, Rani, Delam yang telah membantu serta memberi dukungan selama pengerjaan skripsi ini.
15. Pada teman-teman saya Tinah Siti Marhamah teman seperjuangan di KRL, Teguh dan Abdur yang selalu memberi arahan saat proses penulisan dan bimbingan.
16. Teman-teman seperjuangan saat SMK, Humanika, Aliyanih, Ade Suryani, Putri, Edi yang selalu mendoakan keberhasilan dan kelancaaran selama penulis menempuh pendidikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dan memperbaiki segala kekurangan yang ada, senantiasa dinantikan dan diterima dengan senang hati.

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih banyak dan semoga Allah SWT melimpahkan karunia-Nya dalam setiap amal kebaikan dan diberikan balasan. Aamiin.

Bogor, Juli 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>BAB I Pendahuluan</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah .....	5
1.2.1. Identifikasi Masalah .....	5
1.2.2. Perumusan Masalah.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian .....	6
1.3.1. Maksud Penelitian .....	6
1.3.2. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Kegunaan Penelitian.....	6
1.4.1. Kegunaan Teoritis .....	6
1.4.2. Kegunaan Praktik .....	6
<b>BAB II Tinjauan Pustaka</b>	
2.1 Pajak.....	7
2.1.1 Definisi Pajak .....	7
2.1.2 Fungsi Pajak .....	7
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak .....	8
2.1.4 Pajak Penghasilan .....	8
2.1.5 Objek Pajak Penghasilan .....	9
2.1.6 Pengurang Penghasilan.....	10
2.2 Leverage .....	12
2.3 Ukuran Perusahaan.....	15
2.4 Penghindaran Pajak .....	15



2.4.1	Perlawanan Terhadap Pajak.....	16
2.4.2	Cara Penghindaran Pajak.....	17
2.4.3	Skema Penghindaran Pajak.....	17
2.4.4	Risiko Penghindaran Pajak.....	20
2.4.5	<i>Cash Effective Tax Rate</i> (Tarif Pajak Efektif).....	20
2.5	Penelitian Sebelumnya.....	21
2.6	Kerangka Pemikiran.....	23
2.7	Hipotesis Penellitian.....	24
 <b>BAB III Metode Penelitian</b>		
3.1.	Jenis Penelitian.....	25
3.2.	Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian.....	25
3.2.1.	Objek Penelitian.....	25
3.2.2.	Unit Analisis.....	25
3.2.3.	Lokasi Penelitian.....	25
3.3.	Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	25
3.3.1.	Jenis Data Penelitian.....	25
3.3.2.	Sumber Data Penelitian.....	25
3.4.	Operasional Variabel.....	25
3.5.	Metode Penarikan Sampe.....	26
3.6.	Metode Pengumpulan Data.....	27
3.7.	Metode Pengolahan/Analisis Data.....	27
3.7.1.	Analisis Statistik Deskriptif.....	28
3.7.2.	Uji Asumsi Klasik.....	28
a)	Uji Normalitas.....	28
b)	Uji Multikolonieritas.....	29
c)	Uji heteroskedasitas.....	29
d)	Uji Autokorelasi.....	30
3.7.3.	Analisis Regresi Linear Berganda.....	30
3.7.4.	Pengujian Hipotesis.....	31
a)	Pengujian Koefesien Regresi Parsial (Uji t).....	31
b)	Pengujian Koefesien Regresi (Uji f).....	31
c)	Pengujian Determinasi ( $R^2$ ).....	31

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

4.1. Hasil Pengumpulan Data .....	33
4.1.1. Gambaran Umum Perusahaan .....	34
4.1.2. Perbandingan Leverage (DER) dan Ukuran Perusahaan (Size) Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri 36	36
4.2. Analisis Data .....	41
4.2.1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	41
4.2.2. Uji Asumsi Klasik .....	42
4.2.3. Analisis Regresi Berganda .....	46
4.2.4. Pengujian Hipotesis.....	47
4.3. Pembahasan .....	49
4.3.1. Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia .....	49
4.3.2. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.....	50
4.3.3. Pengaruh Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.....	50
4.4. Interpretasi Hasil Penelitian .....	50
4.4.1. Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak.....	50
4.4.2. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak .....	51
4.4.3. Pengaruh Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia .....	51

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

5.1. Simpulan .....	52
5.2. Saran .....	53

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penghindaran Pajak (Effektive Tax Rate) Perusahaan Sektor Aneka Indurtri Periode 2012-2016 .....	3
Tabel 2. Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	21
Tabel 3. Operasional Variabel.....	26
Tabel 4. Prosedur Pengamatan Sampel.....	27
Tabel 5. Pengambilan Keputusan ada Tidaknya Autokorelasi .....	30
Tabel 6. Prosedur Pengambilan Sampel Setelah Uji Normalitas .....	33
Tabel 7. Daftar Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Mnejadi Objek Penelitian .....	34
Tabel 8. Perhitungan Debt to Equity Ratio (DER) .....	37
Tabel 9. Perhitungan Ukuran Perusahaan (Firm Size).....	38
Tabel 10. Perhitungan Penghindaran Pajak(CETR).....	40
Tabel 11. Analisis Statistik Deskriptif .....	41
Tabel 12. Hasil Uji Normalitas .....	43
Tabel 13. Uji Multikolonieritas.....	44
Tabel 14. Pengambilan Keputusan ada Tidaknya Autokorelasi .....	45
Tabel 15. Hasil Uji Autokorelasi Menggunakan Uji Durbin-Watson.....	46
Tabel 16. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda .....	46
Tabel 17. Hasil Uji Koefesien Determinasi ( $R^2$ ).....	47
Tabel 18. Hasil Uji Koefesien Regresi Secara Parsial (Uji t) .....	48
Tabel 19. Hasil Uji Koefesien Regresi Secara Simultan (Uji F).....	49

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Grafik Kondisi Leverage, Ukuran Perusahaan dan Penghindaran Pajak Perusahaan Sektor Aneka Industri Periode 2012-2016 .....	2
Gambar 2. Kerangka Pemikiran .....	24
Gambar 3. Hasil Uji Normalitas dengan Grafik Histogram .....	42
Gambar 4. Hasil Uji Normalitas dengan Grafik P-Plot .....	43
Gambar 5. Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Scatterplot .....	45

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Hasil Pengujian SPSS (Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Regresi Linear Berganda, Uji t dan Uji F )

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

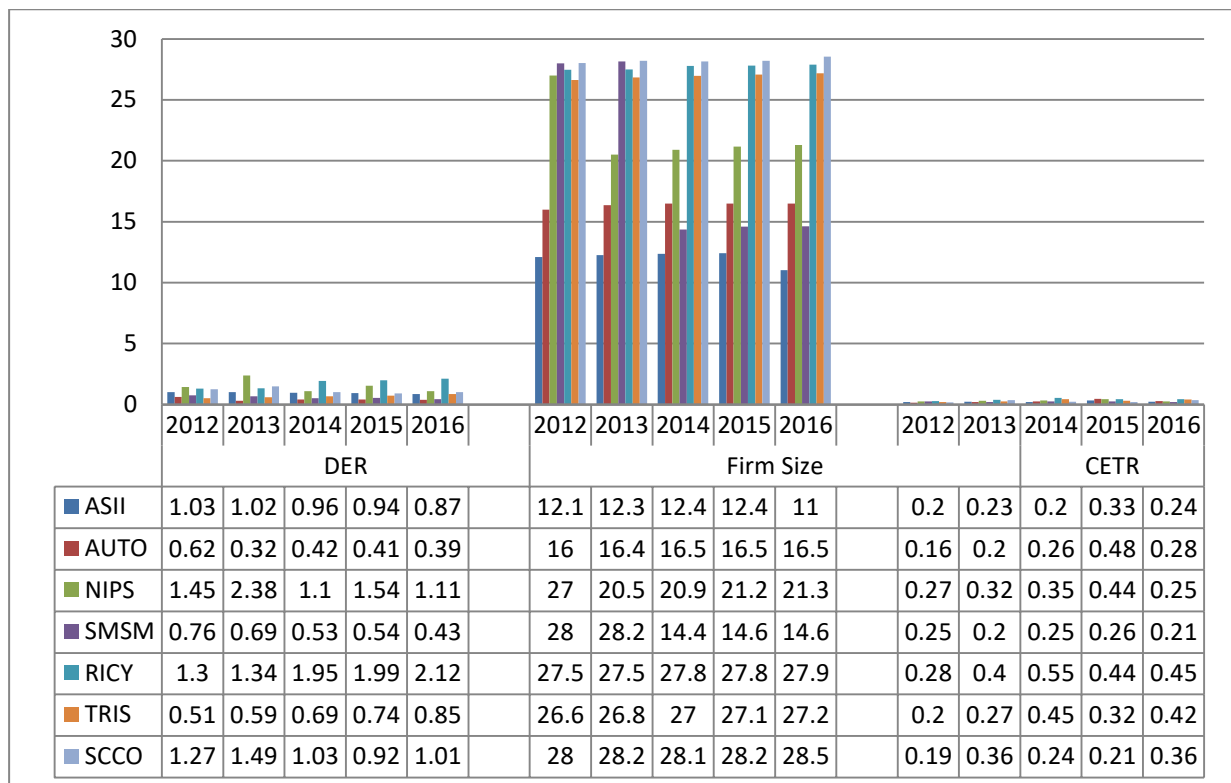
Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Bagi negara-negara yang ada di dunia terutama negara berkembang, pajak merupakan unsur yang paling penting untuk menopang anggaran penerimaan negara. Oleh karena itu pemerintah negara-negara di dunia menaruh perhatian yang begitu besar terhadap sektor pajak. Namun demikian, usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor ini bukan tanpa kendala. Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), bahkan tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Pajak bagi perusahaan merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih, dan sudah jadi rahasia umum perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Hardika, 2007 dalam Kurniasih dan Sari, 2013).

Upaya mengurangi beban pajak dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu *Tax Planning* (perencanaan pajak), *Tax Evasion* (penggelapan pajak) dan *Tax Avoidance* (penghindaran pajak). (Karayan dan Swenson , 2007 dalam Nurfadilah, Henny, Merry dan Hastri) menyatakan bahwa untuk mengukur seberapa baik perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif efektifnya melalui perbandingan antara pajak riil yang dibayarkan perusahaan dengan laba sebelum pajak. Keberadaan nilai *Effective Tax Rate* (ETR) merupakan bentuk perhitungan nilai tarif ideal pajak yang dihitung dalam sebuah perusahaan dan kehadiran *Effective Tax Rate* (ETR) ini menjadi suatu perhatian khusus bagi penelitian karena dapat merangkum efek kumulatif dari berbagai insentif pajak dan perubahan tarif pajak perusahaan (Liansheng et al.,2007).

Penghindaran pajak atau biasa disebut *Tax Avoidance* adalah upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajaknya dengan mencari kelemahan peraturan (*loopholes*) (Hutagoal, 2007 dalam Dewi & Jati, 2014). (Budiman & Setiyono, 2012 dalam Eva Musyarofah, 2016) membedakan deinisi penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dengan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) yaitu Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi pajak yang bersifat legal (*Lawful*), sedangkan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah usaha untuk mengurangi pajak yang bersifat tidak legal (*Unlawful*).



**Gambar 1**

Leverage, Ukuran Perusahaan dan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Aneka Industri Periode 2012-2016

Dapat dilihat pada gambar diatas bahwa *leverage* (DER), ukuran perusahaan (*Firm Size*), dan Penghindaran pajak (CETR) mengamai fluktuatif disetiap tahunnya.

**Tabel 1.**

Penghindaran Pajak (Cash Effective Tax Rate) Perusahaan Sektor Aneka  
Industri Periode 2012-2016

NO	Entitas	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	ASII	<b>20%</b>	<b>23%</b>	<b>20%</b>	33%	<b>24%</b>
2.	AUTO	<b>16%</b>	<b>20%</b>	26%	48%	28%
3.	NIPS	27%	32%	35%	44%	25%
4.	SMSM	25%	<b>20%</b>	25%	26%	<b>21%</b>
5.	RICY	28%	40%	55%	44%	45%
6.	TRIS	<b>20%</b>	27%	45%	32%	42%
7.	SCCO	<b>19%</b>	36%	<b>24%</b>	<b>21%</b>	36%

Sumber data : Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id))

Pengukuran dengan menggunakan CETR dalam penelitian Dessy Mayangsari (2017) menyatakan bahwa apabila nilai tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan tarif pajak statutori yaitu sebesar 25% maka perusahaan dinilai lebih agresif dalam aktivitas perencanaan pajaknya. Pada tabel diatas dapat dilihat terdapat beberapa perusahaan memiliki nilai CETR dibawah 25% yang kemungkinan melakukan pengurangan bahkan penghindaran pajak selama tahun 2012-2016.

Salah satu faktor yang menentukan terjadinya penghindaran pajak atau tax avoidance adalah leverage. Menurut Suyanto & Supramono (2012) perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate return*) yang disebut dengan bunga. Semakin besar utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena 6 insentif pajak atas bunga utang semakin besar. Hal tersebut membawa implikasi meningkatnya penggunaan utang oleh perusahaan.

Faktor lainnya yang juga menjadi faktor penentu dalam penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah ukuran perusahaan. Menurut Dewi & Jati (2014) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total asset, *log size*, dan sebagainya. Semakin besar total asset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaannya maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi Dewi & Jati, (2014).



Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Eva Musyarofah (2016) mengenai “Pengaruh Derivatif Keuangan, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014)”, dalam penelitian tersebut dinyatakan bahwa Derivatif Keuangan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dan Ukuran Perusahaan juga berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI periode 2012-2014.

Hasil penelitian Annisa Fadilla Rachmithasari (2015) studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013, menyatakan bahwa *return on assets* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, komite audit berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak, Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan Kompensasi Rugi Fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Hasil penelitian penghindaran pajak pada penelitian Ana Melyana (2017) *Leverage* yang diproksikan dengan *Debt Equity Ratio* tidak berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang di proksikandengan *Effective tax rate* (studi kasus pada perusahaan Otomotif, Komponen, dan Kabel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015), faktor kepemilikan institusional (KI) tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, *firm size* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dan *profitability* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dapat disimpulkan bahwa *leverage*, kepemilikan institusional, *firm size* dan *profitability* secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin mengetahui pengaruh dari *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Karena masih sedikit penelitian yang membahas tentang pengaruh *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan juga banyaknya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016)**”.

## 1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

### 1.2.1. Identifikasi Masalah

Pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang besar namun bertolak belakang dengan keputusan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Karena pada sisi perusahaan pajak merupakan salahsatu faktor pengurang pendapatan, sedangkan tujuan perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara memperoleh laba maksimum. Perbedaan kepentingan tersebut menimbulkan upaya minimalisasi pajak yang disebut juga penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Suatu perusahaan menginvestasikan dana atau memperoleh sumber dana disertai dengan adanya beban yang harus ditanggung perusahaan. Beban atau biaya yang tinggi akan mengurangi laba bersih yang diperoleh perusahaan sehingga beban pajak yang dibayarkan perusahaan akan semakin kecil. Oleh karena itu, kemampuan perusahaan untuk mempertahankan usahanya dimasa depan dilihat dari seberapa besar tingkat *leverage* perusahaan tersebut.

Penghindaran pajak (*Tax avoidance*) merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah, sehingga menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku agresif atau patuh Kurniasih dan Sari (2013). Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya.

### 1.2.2. Perumusan Masalah

Atas dasar uraian dalam latar belakang penelitian dan identifikasi masalah, permasalahan yang akan dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana terdapat pengaruh antara *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Bagaimana terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Bagaimana terdapat pengaruh antara *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap pennghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1. Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan yang akan diolah dalam makalah ini, dan juga untuk menguji pengaruh *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI.

#### **1.3.2. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai :

1. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dan menambah pengetahuan dibidang akuntansi perpajakan, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak serta memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademis sebagai salah satu upaya untuk memperkaya pengetahuan dan memperdalam bidang yang diteliti.

#### **1.4.2. Kegunaan Praktik**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat dijadikan acuan oleh beberapa pihak terkait dengan keputusan atau kebijakan yang akan diambil.

- a) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan acuan untuk peneliti-peneliti selanjutnya dalam pembahasan yang mengenai pengaruh *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.
- b) Bagi perusahaan, agar perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan lebih meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pajak**

##### **2.1.1. Definisi Pajak**

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Pengertian pajak dalam buku Tomas Sumarsan (2013:3)

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pengertian pajak dalam buku Mardiasmo (2011:1)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R., pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

##### **2.1.2. Fungsi Pajak**

Sebagaimana telah diketahui pengertian pajak dari beberapa definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut waluyo (2010:6) yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)  
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi mengatur (Reguler)  
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

### 2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011:7) menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga sistem yaitu:

#### 1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b) Wajib pajak bersifat pasif
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

#### 2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

#### 3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

### 2.1.4. Pajak Penghasilan

Undang - undang No. 7 Tahun 1984 tentang pajak penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

Undang-undang pajak penghasil (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenai atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Undang-Undang PPh menganut *asas materil*, artinya penentuan mengenai pajak yang terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak.

#### **2.1.5. Objek Pajak Penghasilan**

Objek pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
  - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
  - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya.
  - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
  - d. Keuntungan karena pengalihan harta hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau satu derajat dna badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan dan
  - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
14. Premi asuransi
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan
19. Surplus Bank Indonesia.

#### **2.1.6. Pengurang Penghasilan**

Pajak penghasilan dihitung dari tarif dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan atau pengeluaran tertentu. Pengeluaran tersebut dinamakan juga biaya atau beban.

Biaya-biaya yang diperkenankan sebagai pengurang (*deductible expense*) berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan termasuk :

- a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
  1. biaya pembelian bahan
  2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang
  3. bunga, sewa dan royalty
  4. biaya perjalanan

5. biaya pengolahan limbah
  6. premi asuransi
  7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
  8. biaya administrasi
  9. pajak kecuali Pajak Penghasilan
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. Kerugian selisih kurs mata uang asing;
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
  2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
  3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
  4. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k.
- Yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;



- j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## 2.2. *Leverage*

Rasio ini menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun aset. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal (*equity*). Perusahaan yang baik mestinya memiliki komposisi modal yang lebih besar dari utang. Irham Fahmi (2011, 127).

Rasio leverage secara umum ada 8 (delapan) yaitu *debt to total assets*, *debt to equity ratio*, *times interest earned*, *cash flow coverage*, *long-term debt to total capitalization*, *fixed charge coverage*, dan *cash flow adequacy*.

### a) *Debt to total assets*

Dimana rasio ini disebut juga sebagai rasio yang melihat perbandingan utang perusahaan, yaitu diperoleh dari perbandingan total utang perusahaan, yaitu diperoleh dari perbandingan total utang dibagi dengan total aset. Adapun *debt to total assets* atau debt ratio adalah:

$$\frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Assets}}$$

### b) *Debt to equity ratio*

Mengenai *debt to equity ratio* ini sebagai “Ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor “. Adapun rumus *debt to equity ratio* adalah:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}}$$

### c) *Times Interest Earned*

Interest earned adalah biaya pinjaman pada periode yang berjalan yang memperlihatkan pengeluaran uang dalam laporan rugi laba. dalam persoalan rasio ini Lyn M. Fraser dan Aileen Ormiston menjelaskan, “makin tinggi rasio kelipatan pembayaran bunga makin baik, namun jika sebuah perusahaan menghasilkan laba

yang tinggi, tetapi tidak ada arus kas dari operasi, maka arus kas ini menyesatkan. Membutuhkan uang tunai untuk membayar bunga. “Adapun rumus *times interest earned* menurut Lyn M. Fraser Aileen Ormiston adalah :

$$\frac{\text{Laba Operasi}}{\text{Beban Bunga}}$$

d) *Cash Flow Coverage*

Adapun rumus *cash flow coverage* adalah:

$$\text{Fixed Cost} + \frac{\text{Aliran Kas Masuk} + \text{Depreciation}}{(1 - \text{Tax})} + \frac{\text{Dividen Saham Preferen}}{(1 - \text{Tax})}$$

e) *Long-Term Debt to Total Capitalization*

*Long-term debt to total capitalization* disebut juga dengan utang jangka panjang/total kapitalisasi. *Long term debt* merupakan sumber dana pinjaman yang bersumber dari utang jangka panjang, seperti obligasi dan sejenisnya. Adapun rumus *long-term debt to total capitalization* adalah:

$$\frac{\text{long - term debt}}{\text{Long - term debt} + \text{Ekuitas pemegang saham}}$$

f) *Fixed Charge Coverage*

*Fixed charge coverage* disebut juga dengan rasio menutup beban tetap. Rasio menutup beban tetap adalah ukuran yang lebih luas dari kemampuan perusahaan untuk menutup beban tetap dibandingkan dengan rasio kelipatan pembayaran bunga karena termasuk pembayaran beban bunga tetap yang berkenaan dengan sewa guna usaha. Adapun rumus *fixed charge coverage* adalah:

$$\frac{\text{Laba usaha} + \text{Beban bunga}}{\text{Beban bunga} + \text{Beban sewa}}$$

g) *Cash Flow Adequacy*

*Cash flow adequacy* disebut juga dengan rasio kecukupan arus kas. Kecukupan arus kas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menutup pengeluaran modal, utang jangka panjang, dan pembayaran dividen setiap tahunnya. Dalam konteks ini suatu perusahaan yang baik adalah memiliki kemampuan yang

tinggi dalam menghasilkan arus kas, artinya mampu memberikan arus kas sesuai yang diharapkan. Dan begitu pula sebaliknya jika arus kas yang dihasilkan tidak sesuai harapan maka memungkinkan perusahaan akan mengalami masalah termasuk mencari dan untuk membayar kewajiban-kewajibannya. Adapun rumus *cash flow adequacy* adalah:

$$\frac{\text{Arus kas dari aktivitas operasi}}{\text{Pengeluaran modal} + \text{pelunasan utang} + \text{bayar dividen}}$$

Perusahaan umumnya menggunakan baik pendanaan utang maupun ekuitas. Kreditor biasanya tidak mau memberikan dana tanpa perlindungan dari pendanaan ekuitas. *Leverage* keuangan mengacu pada jumlah pendanaan utang dalam struktur modal suatu perusahaan. Perusahaan dengan *leverage* keuangan disebut memperdagangkan ekuitas (*trading on the equity*). Hal ini menunjukkan perusahaan menggunakan modal ekuitas sebagai dasar pinjaman untuk mendapatkan kelebihan pengembalian, Eva Musyarofah (2016).

Menurut Kurniasih dan sari (2013,63) *leverage* adalah rasio yang mengukur kemampuan hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aktiva perusahaan. *Leverage* ini menjadi sumber pendanaan perusahaan dari hutang eksternal. Hutang yang dimaksud adalah hutang jangka panjang. Beban bunga secara jangka panjang akan mengurangi beban pajak yang ada.

Akibat utama penggunaan dana pinjaman (utang jangka panjang) menyebabkan perusahaan harus menanggung beban tetap berupa bunga atas pembayaran utang. Penggunaan dana yang menyebabkan beban tetap ini dapat mengurangi pendapatan kena pajak perusahaan melalui pembebanan bunga utang sebagai biaya. Pembebanan bunga utang tersebut dapat dipergunakan untuk mengurangi beban pajak, sehingga penggunaan utang akan memberikan manfaat pajak bagi perusahaan, Eva Musyarofah (2016).

Varibael *leverage* diukur dengan *Debt to Equity Ratio* (DER). Pengertian *Debt to Equity Ratio* (DER) menurut kasmir (2014, 158), yang menyatakan bahwa :

“*Debt to Equity Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas rasio ini dicari dengan membandingkan antara seluruh hutang. Termasuk hutang lancar dan seluruh ekuitas rasio ini digunakan untuk mengetahui jumlah dana disedikan peminjaman (kreditor)dengan pemilik perusahaan dengan kata lain rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan hutang.”

Rumusan untuk mencari *debt to equity ratio* yang yang digunakan perbandingan antara total utang dengan total ekuitas sebagai berikut. Kasmir (2014, 158).

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}}$$

### 2.3. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu *large firm*, *medium firm*, dan *small firm* Kurniasih dan Sari (2013). Penentuan ukuran perusahaan didasarkan kepada total aset perusahaan. Semakin besar total aset maka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relative panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil, Eva Musyarofah (2016).

Menurut Ana Meliyana (2017) ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinyatakan dengan total aktiva atau total penjualan bersih. Semakin besar total aktiva maupun penjualan maka semakin pula ukuran suatu perusahaan. Semakin besar aktiva maka semakin besar modal yang ditanam, sementara semakin banyak penjualan maka semakin banyak juga perputaran uang dalam perusahaan. Dengan demikian, ukura perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan.

$$\text{Firm size} = \text{Logaritma Natural} \times \text{Total Asset} \\ \text{atau Ln (Total Aset)}$$

### 2.4. Penghindaran Pajak

Menurut Chairil Anwar Pohan (2014, 41), “*Tax Avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya dilakukan secara ilegal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (*non contrary to the law*) di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah paja yang terutang”.

Penghindaran pajak adalah pengaturan untuk meminimumkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya. *Tax Avoidance* bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan dan meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang – Undang pajak. Kurniasih & Sari (2013).

Menurut Erly Suandi (2008:7) dalam buku perencanaan pajak penghindaran pajak adalah rekayasa “*Tax Affairs*” yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Penghindaran pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang.

Menurut Thomas Sumarsan (2013 : 8,9) penghindaran pajak terjadi sebelum SKP keluar. Dalam penghindaran pajak ini, waib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang.

Dalam kutipan buku Perpajakan Indonesia yang ditulis oleh Thomas Sumarsan (2013, 9) Penghindaran pajak dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

1. Menahan Diri

Yang dimaksud dengan menahan diri yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak.

2. Lokasi Terpencil

Memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah.

#### **2.4.1. Perlawanan Terhadap Pajak**

Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dalam peran sertanya menanggung pembiayaan negara, maka dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Terlepas dari kesadaran sebagai warga negara, pada sebagian besar masyarakat tidak memenuhi kewajiban pembayar pajak. Dalam hal demikian timbul perlawanan terhadap pajak.

Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi perlawanan pasif dan perlawanan aktif sebagaimana dikutip berdasarkan buku Perpajakan Indonesia yang ditulis oleh Thomas Sumarsan (2013,8).

2. Perlawanan pasif

Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak. Ada 3 cara perlawanan aktif terhadap pajak yaitu:

- a. Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)
- b. Pengelakan pajak (*Tax Evation*)
- c. Melalaikan pajak

### 2.4.2. Cara Penghindaan Pajak

Dalam ketentuan perpajakan, masih terdapat berbagai celah (*loophole*) yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan agar jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan optimal dan minimum (secara keseluruhan). Optimal disini diartikan sebagai perusahaan tidak bayar, membayar pajak dengan jumlah yang 'paling sedikit' namun tetap dilakukan dengan cara yang elegan dan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.

Selain menghindari transaksi yang merupakan obyek pajak, langkah-langkah penghematan pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan antara lain :

- a. Memilih bentuk usaha yang memiliki tarif pajak terendah,
- b. Memaksimalkan biaya yang telah dikeluarkan agar dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan.
- c. Memilih berbagai alternatif transaksi yang memberikan efek beban pajak terendah,
- d. Memaksimalkan kredit pajak yang telah dibayar

Selain melalui cara-cara diatas, Ana Meliyana (2017) mengungkapkan beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak yaitu :

- a. Merupakan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut.
- b. Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional, dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan.
- c. Membebankan biaya operasional sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih.
- d. Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.
- e. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.

### 2.4.3. Skema Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak umumnya dilakukan melalui skema-skema transaksi yang dirancang secara sistematis dan umumnya hanya dapat dilakukan oleh korporasi besar, dan hal inilah yang menimbulkan persepsi ketidakadilan. Beberapa skema penggelapan pajak yang umumnya dilakukan oleh perusahaan PMA dalam aktivitas *foreign direct investmen* adalah :

#### 1. *Transfer Pricing*

*Transfer pricing* merupakan jumlah harga atas penyerahan (transfer) barang atau imbalan atas penyerahan jasa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam transaksi bisnis maupun finansial, Ana Meliyana (2017). Dalam konteks perpajakan transfer pricing digunakan untuk merekayasa pembebanan harga suatu

transaksi antara perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dalam rangka meminimalkan beban pajak yang terutang secara keseluruhan atas grup perusahaan. Dari sisi negara, praktik transfer pricing dapat mengakibatkan distorsi penerimaan negara dari sektor pajak.

Griffin dan Pustay (2015, 142) dalam Ana Meliyana (2017), perusahaan multinasional berusaha untuk memaksimalkan laba bersih setelah pajak dengan cara “*they may manipulate transfer prices to shift reported profits from high-tax countries to low-tax countries*”. Skema transfer pricing yang umumnya dilakukan oleh perusahaan adalah :

- a. Menggelambungkan *inter company cost*.
- b. Membebaskan biaya royalti atas pemakaian merek dagang milik induk perusahaan yang sebenarnya tidak diperlukan.
- c. Memperbesar biaya bahan baku dan atau memperkecil penghasilan dari penjualan barang.
- d. Memperkecil omzet penjualan melalui transaksi maklon.
- e. Pinjaman saham melalui perusahaan PMA, dilakukan dengan cara (1) membebaskan biaya bunga dari dari pinjaman pemegang saham kepada pemberi pinjaman diluar negeri, atau (2) penghindaran PPh pemotongan dan pemungutan (*with holding tax*), yaitu melalui praktik pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham, dan praktik pemakaian bahan baku untuk perusahaan di luar negeri dan pemakaian merek dagang induk perusahaan tanpa pembayaran royalti kepada induk perusahaan di luar negeri.

## 2. Pemanfaatan *Tax Haven Country*

Negara *tax haven* merupakan suatu lokasi yang menawarkan kewajiban pajak yang rendah atau daerah yang tidak akan dikenakan pajak di mana para perusahaan melakukan usaha. Namun demikian, beberapa ahli perpajakan ada yang berpendapat bahwa negara *tax haven* tidak dapat didefinisikan dengan jelas karena sifatnya sangat relatif, yaitu tergantung pada ketentuan masing-masing negara. Suatu negara dapat saja disebut sebagai *tax haven* oleh negaran lain apabila negara tersebut memberikan suatu insentif dalam kegiatan perekonomian di suatu daerah dalam wilayah negara tersebut. Jadi, apakah suatu negara akan diklasifikasikan sebagai negara *tax haven* atau tidak oleh negaralain tergantung dari definisi negara *tax haven* atau tidak oleh negara lain tergantung dari definisi negara *tax haven* yang diberikan oleh negara lain tersebut.

## 3. *Thin capitalization*

*Thin capitalization* merupakan modal terselubung melalui pinjaman yang melampaui batas kewajaran. Pinjaman dalam konteks *thin capitalization* ini adalah pinjaman berupa uang atau modal dari pemegang saham atau pihak-pihak lain yang

memiliki hubungan istimewa dengan pihak peminjam (Ana Meliyana dalam Rohatgi, 2002,83).

Pada umumnya bunga yang dibayar kepada pemberi pinjaman yang bukan penduduk di negara peminjam dapat dijadikan pengurang pada penghasilan kena pajak si peminjam, sedangkan deviden tidak dapat dijadikan sebagai pengurang. (Menurut Gunadi, 1994, 15 dalam Ana Meliyana, 2017), pemberian pinjaman dalam skema *thin capitalization* dapat dilakukan melalui beberapa cara sebagai berikut:

a. *Direct loan*

*Direct loan* adalah pinjaman diperoleh secara langsung dari investor (pemegang saham). Dari pinjaman tersebut investor mendapatkan bunga yang besarnya pada umumnya ditentukan oleh investor tersebut.

b. *Back to back loan*

*Back to back loan* adalah investor menyerahkan dananya kepada mediator sebagai pihak ketiga untuk langsung dipinjamkan kepada anak perusahaan dengan pemberiannya imbalan.

c. *Paralel loan*

*Paralel loan* adalah investor luar negeri mencari mitra perusahaan indonesia yang mempunyai anak perusahaan yang berada di negara investor. Sebagai imbalan atas pemberian pinjaman kepada anak perusahaan (indonesia) di negara investor, selanjutnya investor meminta kepada perusahaan indonesia untuk juga memberikan pinjaman kepada anak perusahaan milik investor di indonesia.

4. *Treaty Shopping*

*Tax treaty* dapat dijadikan objek untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak, meskipun tujuan dari *tax treaty* pada hakekatnya adalah untuk mencegah penghindaran pajak. Skema *treaty shopping* dilakukan oleh penduduk suatu negara yang tidak memiliki *tax treaty* mendirikan anak perusahaan di negara yang memiliki *tax treaty* mendirikan anak perusahaan di negara yang memiliki *tax treaty* dan melakukan kegiatan investasinya melalui anak perusahaan tersebut, sehingga investor dapat menikmati tarif pajak rendah dan fasilitas-fasilitas perpajakan lainnya yang tercantum dalam *tax treaty*. Skema *treaty shopping* dilakukan untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas hanya boleh dinikmati oleh residen (subjek pajak dalam negeri) dari kedua negara yang mengikat perjanjian.

5. *Controlled Foreign Corporation (CFC)*

Penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara menunda pengakuan penghasilan modal yang bersumber dari luar negeri (khususnya di negara *tax haven*) untuk dikenakan pajak di dalam negeri. Skema CFC dilakukan dengan mendirikan entitas di luar negeri dimana wajib oajak dalam negeri (WPDN) memiliki pengendalian. Upaya WPDN untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar atas



investasi yang dilakukan di luar negeri adalah dengan menahan laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang sahamnya. Dengan memanfaatkan adanya hubungan istimewa dan kepemilikan mayoritas saham, badan usaha di luar negeri tersebut dapat dikendalikan sehingga deviden tidak dibagikan/ditangguhkan. Upaya di atas akan semakin menguntungkan bagi perusahaan jika badan usaha di luar negeri didirikan di negara *tax haven* atau *low tax jurisdiction*.

#### **2.4.4. Risiko Penghindaran Pajak**

Penghindaran pajak bukannya bebas biaya. Beberapa biaya yang harus ditanggung yaitu pengorbanan waktu dan tenaga untuk melakukan penghindaran pajak, dan adanya risiko jika penghindaran pajak terungkap. Risiko ini mulai dari yang dapat dilihat, yaitu bunga dan denda dan yang tidak terlihat, yaitu kehilangan reputasi perusahaan, yang berakibat buruk untuk kelangsungan usaha jangka panjang perusahaan.

Ada pula risiko penghindaran pajak yang lain. Karena yang menggerakkan jalannya perusahaan adalah manajer, maka pelaku utama penghindaran pajak adalah mereka. Manajer yang menentukan seberapa tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Masalah timbul bila manajer memanfaatkan posisinya untuk mengalihkan sumber daya perusahaan bagi keuntungan pribadinya, yang biasa disebut dengan masalah agensi. Disinilah peran tata kelola perusahaan yang merupakan mekanisme untuk mengontrol manajer agar bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Tata kelola perusahaan memegang peran yang signifikan dalam mempengaruhi perilaku manajer. Dalam perusahaan dengan tata kelola yang buruk, ketika insentif untuk manajer meningkat, tingkat penghindaran pajak perusahaan menurun. Hal ini disebabkan pengalihan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi manajer. Pemegang saham juga berusaha untuk tidak melakukan penghindaran pajak yang terlalu banyak sehingga terlalu banyak risiko, atau terlalu sedikit sehingga memaksimalkan keuntungan. Tata kelola perusahaan adalah alat bagi pemegang saham guna mengarahkan manajer untuk menyesuaikan dengan tingkat penghindaran pajak yang diharapkan.

#### **2.4.5. Cash Effective Tax Rate**

Menurut (Fatimatus zahra, 2017) Cash Effective Tax Rate, yaitu kas yang dikeluarkan untuk membayar beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Semakin rendah kas yang dibayarkan perusahaan untuk beban pajak mengindikasikan bahwa semakin tinggi perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak.

$$\text{CETR} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

## 2.5. Penelitian Sebelumnya

**Tabel 2.**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Eva Musyarofah (2016)	Pengaruh Derivatif Keuangan, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak ( <i>Tax Avoidance</i> )	Dependen : Penghindaran Pajak ( <i>Tax Avoidance</i> )  Independen : Derivatif Keuangan, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Derivatif Keuangan, <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (<i>Tax Avidance</i>)</li> </ul>
2.	Ana Melyana (2017)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi <i>Tax Avoidance</i> pada perusahaan Otomotif, Komponen, dan Kabel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015	Dependen : <i>Tax Avoidance</i>  Independen : <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional, <i>firm size</i> , <i>Profitability</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Leverage</i>, <i>Firm Size</i>, dan <i>Profitability</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (<i>Tax Avoidance</i>)</li> <li>• Kepemilikan Institusional berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak (<i>Tax Avoidance</i>)</li> </ul>
3.	Dessy Mayangsari (2017)	Pengaruh profitabiitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> dan <i>Corporate Governance</i> terhadap Agresivitas pajak perusahaan	Dependen : Agresivitas Pajak  Independen : Profitabilitas, Likuiditas, <i>Leverage</i> , proporis komisaris independen, jumlah komite audit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap Agresivitas Pajak</li> <li>• Likuiditas berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Agresivitas Pajak.</li> <li>• <i>Leverage</i> berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap</li> </ul>

				<p>Agresivitas Pajak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh positif signifikan terhadap Agresivitas Pajak.</li> </ul>
4.	Gusti Maya Sari (2014)	Pengaruh <i>corporate governance</i> , ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal dan struktur kepemilikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<p>Dependen : <i>Tax Avoidance</i></p> <p>Independen : Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Struktur Kepemilikan Institusional</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap <i>Tax Avoidance</i></li> <li>• Komite Audit, Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i></li> </ul>
5.	Anissa Fadilla Rachmithasari (2015)	Pengaruh <i>Return On Assets, Leverage, Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada <i>Tax Avoidance</i> .	<p>Dependen : <i>Tax Avoidance</i></p> <p>Independen : <i>Return On Assets, Leverage, Corporate Governance</i>, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Return On Assets</i> , Kompensasi Rugi Fiskal dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i></li> <li>• <i>Leverage</i>, Komposisi Komisaris dan Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i></li> </ul>
6.	Tommy Kurniasih & Maria M. Ratna Sari (2013)	Pengaruh <i>Return On Assets, Leverage, Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada <i>Tax Avoidance</i>	<p>Dependen : <i>Tax Avoidance</i></p> <p>Independen : <i>Return On Assets,</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Return on Assets, Leverage, Corporate Governance</i>, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan secara</li> </ul>

			<i>Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal</i>	simultan terhadap <i>Tax Avoidance</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Return on Assets, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal</i> berpengaruh signifikan secara parsial terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</li> <li>• <i>Leverage dan Corporate Governance</i> tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</li> </ul>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

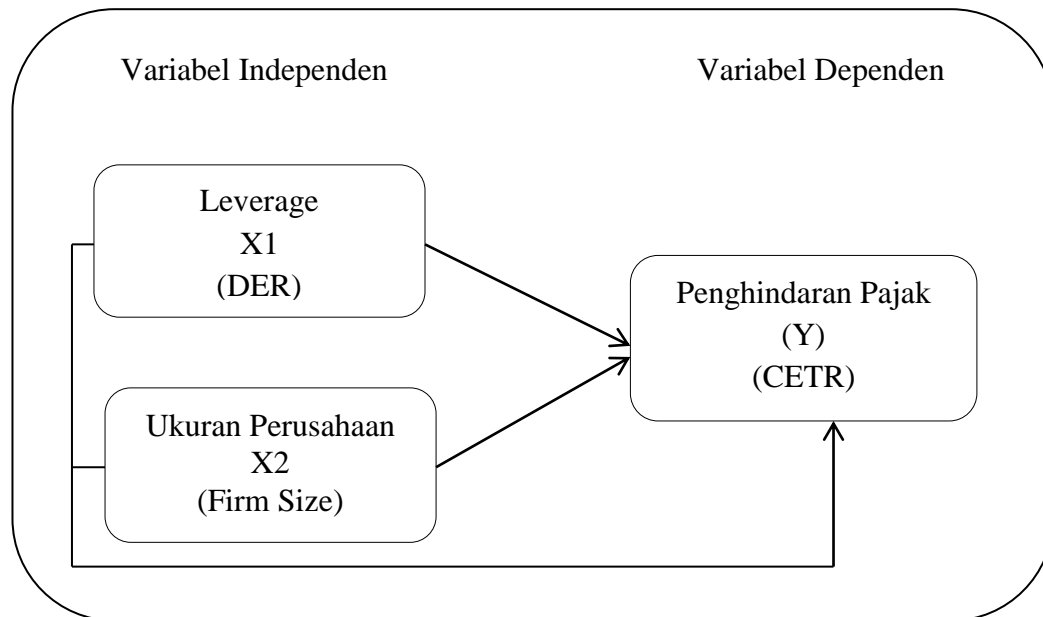
## 2.6. Kerangka Pemikiran

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa leverage merupakan Rasio yang menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun aset. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal (*equity*). Perusahaan yang baik mestinya memiliki komposisi modal yang lebih besar dari utang. Ketika perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate return*) yang disebut dengan bunga. Semakin besar utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil, Hal tersebut membawa implikasi meningkatnya penggunaan utang oleh perusahaan.

Selain itu ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinyatakan dengan total aktiva atau total penjualan bersih. Semakin besar total aktiva maupun penjualan maka semakin besar pula ukuran suatu perusahaan. Semakin besar aktiva maka semakin besar modal yang ditanam, sementara semakin banyak penjualan maka semakin banyak juga perputaran uang dalam perusahaan. Dengan demikian, ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya asset yang dimiliki oleh perusahaan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dibuat suatu kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan variabel – variabel yang dijelaskan sebelumnya. Kerangka penelitian diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah

yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis dan teknik analisis statistic yang akan digunakan, sugiono (2011, 42) dalam Ana meliyana (2017)



**Gambar 2.** Kerangka Pemikiran

## 2.7. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu masalah. Jawaban tersebut masih perlu diuji kebenarannya. Seorang peneliti akan mengamati sesuatu gejala, peristiwa, atau masalah yang menjadi fokus perhatiannya. Sebelum mendapatkan fakta yang benar, mereka akan membuat dugaan tentang gejala, peristiwa, atau masalah yang menjadi titik perhatiannya tersebut (Qania Tsany, 2017). Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mengemukakan hipotesis dari penelitian ini adalah :

H1 : Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H2 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H3 : Leverage dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian kuantitatif dengan melakukan uji hipotesis. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan melihat laporan tahunan perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

#### **3.2. Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian**

##### **3.2.1. Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah pengaruh *leverage* dan ukuran perusahaan sebagai variable Independen terhadap penghindaran pajak sebagai variable Dependen..

##### **3.2.2. Unit Analisis**

Unit Analisis penelitian ini adalah organization berupa laporan keuangan perusahaan Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 hingga 2016.

##### **3.2.3. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi lokasi perusahaan manufaktur sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2012-2016 yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia.

#### **3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian**

##### **3.3.1. Jenis Data Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kuantitatif, yaitu data yang berupa skala *numeric* (angka) dan diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang telah diaudit selama periode 2012-2016.

##### **3.3.2. Sumber Data Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. Data diperoleh melalui data yang digunakan dalam penelitian sebelumnya dan homepage Bursa Efek Indonesia (<http://www.idx.co.id>).

#### **3.4. Operasionalisasi Variabel**

Untuk memudahkan proses analisis, maka penulis akan mengklasifikasikan terlebih dahulu variabel penelitian ke dalam 2 kelompok, yaitu :

1. Variabel Independen (Variabel Bebas)  
Variabel ini merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)
2. Variabel Dependen (Variabel Terikat)  
Variabel ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

**Tabel 3**

## Operasionalisasi Variabel

Pengaruh *Leverage* dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak  
(Studi Kasus Pada Perusahaan Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016)

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Leverage	<i>Total Debt to Equity Ratio</i>	$Debt\ to\ equity\ ratio = \frac{Total\ Liabilitas}{Total\ Ekuitas} \times 100\%$	Rasio
Ukuran Perusahaan	Aset Perusahaan	Firm size = Logaritma Natural x Total Asset atau Ln (Total Aset)	Rasio
Penghindaran Pajak	Pembayaran Pajak	$CETR = \frac{Beban\ Pajak}{Laba\ Sebelum\ Pajak}$	Rasio

**3.5. Metode Penarikan Sampel**

Penelitian ini menggunakan sampel data perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penarikan sampel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menggunakan metode penarikan sampel purposive sampling. Beberapa kriteria yang ditetapkan dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-2016.
2. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan secara rutin pada tahun 2012-2016.
3. Sampel menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah berturut – turut selama 2012-2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember selama periode pengamatan tahun 2012-2016.
4. Sampel konsisten dan tidak delisting selama tahun pengamatan 2012-2016
5. Sampel memiliki laba sebelum pajak positif berturut – turut antara tahun 2012-2016.

6. Perusahaan sektor aneka industri yang memiliki nilai CETR >1 selama periode 2012-2016

**Tabel 4**  
**Prosedur Pengamatan Sampel**

Keterangan	Jumlah
Jumlah perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016	43
Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan selama tahun 2012 -2016	(9)
Perusahaan menggunakan mata uang selain rupiah selama periode pengamatan	(11)
Perusahaan yang memiliki laba sebelum pajak negatif	(8)
Perusahaan sektor aneka industri yang memiliki nilai CETR >1 selama periode 2012-2016	(7)
Jumlah perusahaan yang diteliti	8
Periode pengamatan	5

(Sumber: Data sekunder yang diperoleh)

### 3.6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode documenter, karena data yang dikumpulkan berupa data sekunder. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder disini menggunakan data runtut waktu (*time series*) atau disebut juga data tahunan dan data antar ruang (*cross section*). Data yang digunakan berupa laporan keuangan tahunan perusahaan periode 2012 sampai 2016. Data tersebut diperoleh dari melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia di <http://www.idx.co.id>. Selain itu juga dilakukan penelusuran berbagai jurnal, karya ilmiah, artikel, dan berbagai buku referensi sebagai sumber data dan acuan dalam penelitian ini.

### 3.7. Metode Pengolahan/Analisis Data

Untuk mempermudah pengolahan data maka penulis menggunakan bantuan SPSS versi 23. Selanjutnya dilakukan analisis data yaitu uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Adapun penjelasan mengenai masing-masing metode analisis data tersebut adalah sebagai berikut:



### 3.7.1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan daftar demografi responden. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtois dan skewness (kemencengan distribusi).

### 3.7.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan layak untuk dianalisis atau tidak, karena tidak semua data dapat dianalisis dengan regresi. Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data sekunder ini, maka peneliti melakukan uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedasitas, uji autokorelasi.

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t atau uji f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Apabila nilai residual yang dihasilkan tidak berdistribusi normal, maka uji statistik menjadi tidak valid, (Imam Ghozali, 2016:154). Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi secara normal, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik.

#### 1. Analisis grafik

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dan grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan yaitu :

- Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

#### 2. Analisis statistik

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik nonparametrik Kolomogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:

H<sub>0</sub>: Data residual berdistribusi normal

H<sub>A</sub>: Data residual berdistribusi tidak normal

Jika signifikansi < 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan dengan data normal baku, berarti data tersebut tidak normal atau H<sub>0</sub> ditolak.

### **b. Uji Multikolonieritas**

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel besar (Imam Ghozali, 2016: 103). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen sama dengan nol untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas didalam model regresi adalah sebagai berikut :

- a. Nilai  $R^2$  yang dihasilkan dalam suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan memengaruhi variabel dependen.
- b. Menganalisis matrik korelasi antara variabel-variabel independen. Jika antara variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0.90) maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas.
- c. Melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Nilai yang digunakan untuk menunjukkan multikolonieritas adalah nilai tolerance  $\leq 0,10$  atau sama dengan nilai VIF  $\geq 10$ .

### **c. Uji Heteroskedastisitas**

Menurut Imam Ghozali (2016: 134) mengatakan bahwa uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedasitas atau tida terjadi heteroskedasitas.

Cara untuk mendeteksi ada atau todaknya heteroskedasitas pada model regresi yang akan diuji, yaitu dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SPRESID dan ZPRED dimana subu Y adalah Y yang teah diprediksi, dengan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di studentized. Dasar analisis dalam pengujian ini adalah :

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedasitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jeas, serta titik – titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjasi heteroskedasitas.

#### d. Uji Autokolerasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena obsevrasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.

Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (time series) karena “gangguan” pada seseorang individu/ kelompok yang sama pada periode berikutnya. Pada data *crosssection* (silang waktu), masalah autokorelasi relatif jarang terjadi karena “gangguan” pada observasi yang berbeda berasal dari individu. Kelompok yang berbeda. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

Menurut Imam Ghozali (2016, 108) kriteria autokorelasi uji *Durbin-Watson* (DW) sebagai berikut:

**Tabel 5**  
**Pengambilan keputusan ada tidaknya Autokorelasi**

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d1$
Tidak ada autokorelasi positif	No <i>decision</i>	$D1 \leq d \leq du$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - d1 < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	No <i>decision</i>	$4 - du \leq d \leq 4 - d1$
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	Tidak ditolak	$Du < d < 4 - du$

#### 3.7.3. Analisis Regresi Berganda

Apabila semua data sudah memenuhi syarat asumsi klasik, maka selanjutnya data tersebut dapat dilakukan uji regresi. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur pengaruh atau hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Model persamaan analisis regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 \cdot X_1 + b_2 \cdot X_2 + \dots + e$$

Dimana:

Y = penghindaran pajak

a = Konstanta

$b_1$  = Koefisien regresi untuk Debt to equity ratio

$X_1$  = *Leverage*

$b_2$  = Koefisien regresi untuk total aset

$X_2$  = Ukuran Perusahaan

E = *Eror*

### 3.7.4. Pengujian Hipotesis

Menurut (Imam Ghozali 2016, 95), ketepatan fungsi regresi dalam mengestimasi nilai aktual dapat diukur dari *Goodness of Fit*-nya. Secara statistik dapat diukur dari nilai statistik t, nilai statistik f dan koefisien determinasinya. Suatu perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji yang dikehendaki statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana  $H_0$  ditolak).  $H_0$  yang menyatakan bahwa variabel independen tidak berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap variabel dependen. Sebaliknya disebut tidak signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana  $H_0$  diterima.

#### a. Pengujian Koefisien Regresi Parsial (uji t)

Uji Parsial pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam mempengaruhi variabel dependen (Imam Ghozali 2016, 97). Dasar pengambilan keputusan yang digunakan adalah :

1. Jika nilai t hasil perhitungan yang diperoleh dari hasil pengolahan nilainya lebih besar dari t tabel, maka dapat disimpulkan ada pengaruh secara parsial antara variabel independen dengan variabel dependen.
2. Jika nilai t hasil perhitungan yang diperoleh dari hasil pengolahan nilainya lebih kecil dari t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh secara parsial antara variabel independen dengan variabel dependen.

#### b. Pengujian Koefisien Regresi (Uji F)

Uji F atau koefisien regresi secara serentak, yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak (Imam Ghozali 2016, 96).

Dasar pengambilan keputusan yang digunakan adalah:

1. Jika  $F_{hitung}$  yang diperoleh hasil pengolahan nilainya lebih besar dari  $F_{tabel}$ , maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh secara simultan antara semua variabel independen dengan variabel dependen.
2. Jika  $F_{hitung}$  yang diperoleh hasil pengolahan nilainya lebih kecil dari  $F_{tabel}$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh secara simultan antara semua variabel independen dengan variabel dependen.

#### c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Besarnya koefisien determinasi ini adalah nol sampai dengan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti determinasi ini adalah nol sampai dengan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel – variabel

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Apabila koefisien determinasi ( $R^2$ ) = 0 berarti tidak ada hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Sebaliknya untuk koefisien determinasi ( $R^2$ ) = 1 maka terdapat hubungan yang sempurna. Digunakan adjusted  $R^2$  sebagai koefisien determinasi apabila variabel bebas lebih dari dua.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### 4.1. Hasil Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini terdapat satu variabel dependen dan dua variabel independen yaitu variabel-variabel *leverage* dan ukuran perusahaan serta pengaruhnya terhadap penghindaran pajak. Populasi penelitian ini adalah perusahaan Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016. Sampel yang didapatkan sebanyak 7 perusahaan sektor Aneka Industri dengan data observasi 43 perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.

Berdasarkan pada data yang diperoleh dari [www.sahamok.com](http://www.sahamok.com) perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diklasifikasikan berdasarkan jenis produk yang dihasilkan, antara lain :

1. Otomotif dan Komponen
2. Mesin dan Alat Berat
3. Tekstil dan Garment
4. Alas Kaki
5. Kabel
6. Elektronika
7. Lainnya.

**Tabel 6.**

Prosedur Pengambilan Sampel setelah Uji Normalitas

Keterangan	Jumlah
Jumlah perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016	43
Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan selama tahun 2012 -2016	(9)
Perusahaan menggunakan mata uang selain rupiah selama periode pengamatan	(11)
Perusahaan yang memiliki laba sebelum pajak negatif	(8)
Perusahaan sektor aneka industri yang memiliki nilai CETR >1 selama periode 2012-2016	(7)
Jumlah perusahaan yang diteliti	8
Data Outliers	(1)
Jumlah Perusahaan yang diteliti	7
Periode Pengamatan	5
Total Sampel (5x10)	35

(Sumber : Data diolah, 2018)

Pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu 43 perusahaan. Berdasarkan kriteria dan prosedur pengambilan sampel setelah uji normalitas diatas terdapat 7 perusahaan sektor aneka industri yang sesuai dengan kriteria yang telah di tentukan.

**Tabel 7.**

Daftar Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri  
yang Menjadi Objek Penelitian

No	Kode Saham	Nama Emiten	Tanggal IPO
1	ASII	Astra Internasional Tbk	04-Apr-90
2	AUTO	Astra Otoparts Tbk	15-Jun-98
3	NIPS	Nipress Tbk	24-Jul-91
4	SMSM	Selamat Sempurna Tbk	09-Sep-96
5	RICY	Ricky Putra Globalindo Tbk	22-Jan-98
6	TRIS	Trisula Internasional Tbk	28-Jun-12
7	SCCO	Supreme Cable Manufacturing Corporation Tbk	20-Jul-82

(Sumber : Data diolah, 2018)

#### 4.1.1. Gambaran Umum Perusahaan

##### 1. Astra Internasional Tbk

Astra International (ASII) merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi otomotif yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1957 dengan nama PT Astra International Incorporated. Pada tahun 1990, perseroan mengubah namanya menjadi PT Astra International Tbk. Perusahaan ini telah tercatat di Bursa Efek Jakarta sejak tanggal 4 April 1990. Saat ini mayoritas kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Jardine Matheson 50,1%.

Perseroan berdomisili di Jakarta, Indonesia, dengan kantor pusat di Jl. Gaya Motor Raya No. 8, Sunter II, Jakarta. Ruang lingkup kegiatan Perseroan seperti yang tertuang dalam anggaran dasarnya adalah perdagangan umum, perindustrian, jasa pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan dan jasa konsultasi. Ruang lingkup kegiatan utama entitas anak meliputi perakitan dan penyaluran mobil, sepeda motor dengan suku cadangnya, penjualan dan penyewaan alat berat, pertambangan dan jasa terkait, pengembangan perkebunan, jasa keuangan, infrastruktur dan teknologi informasi.

## 2. Astra Otoparts Tbk

Astra Otoparts Tbk (AUTO) didirikan tanggal 20 September 1991 dan memulai kegiatan komersialnya pada tahun 1991. Kantor pusat AUTO beralamat di Jalan Raya Pegangsaan Dua Km. 2,2, Kelapa Gading, Jakarta 14250 – Indonesia, dan pabrik berlokasi di Jakarta dan Bogor

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan AUTO terutama bergerak dalam perdagangan suku cadang kendaraan bermotor, baik lokal maupun ekspor, dan manufaktur dalam bidang industri logam, plastik dan suku cadang kendaraan bermotor.

## 3. Nipress Tbk

Nipress Tbk (NIPS) didirikan 24 April 1975 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1975. Kantor pusat dan pabrik NIPS berlokasi di Jl. Narogong Raya Km. 26 Cileungsi, Bogor, Jawa Barat 16710 – Indonesia.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan NIPS meliputi bidang usaha industri accu lengkap untuk segala keperluan dan usaha-usaha lainnya yang berhubungan dengan accu. Produk utama Nipress adalah aki motor, aki mobil dan aki industri (merek NS dan Maxlife).

## 4. Selamat Sempurna Tbk

Selamat Sempurna Tbk (SMSM) didirikan di Indonesia pada tanggal 19 Januari 1976 dan memulai kegiatan operasi komersialnya sejak tahun 1980. Kantor pusat SMSM berlokasi di Wisma ADR, Jalan Pluit Raya I No. 1, Jakarta Utara 14440–Indonesia, sedangkan pabriknya berlokasi di Jakarta dan Tangerang.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan SMSM terutama adalah bergerak dalam bidang industri alat-alat perlengkapan (suku cadang) dari berbagai macam alat-alat mesin pabrik dan kendaraan, dan yang sejenisnya. Merek produk dari Selamat Sempurna Tbk, antara lain: merek Sakura untuk produk S/F dan Filtration; dan merek ADR untuk produk radiator, dump hoist, coolant dan brake parts.

## 5. Ricky Putra Globalindo Tbk

Ricky Putra Globalindo Tbk (RICY) didirikan 22 Desember 1987 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1988. Kantor pusat RICY berlokasi di Jln. Sawah Lio II No. 29 – 37 Jembatan Lima, Tambora, Jakarta 11250 sedangkan pabrik berlokasi di Citeureup-Bogor dan Cicalengka-Bandung.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan RICY terutama bergerak dalam bidang industri pembuatan pakaian dalam dan pakaian jadi (fashion wear). Saat ini, RICY mempunyai 2 bidang usaha, yaitu: 1). pakaian jadi (merek Ricky, GT Man, Ricsony, GT Man Kid, GT Kid, GT Man Sport dan BUM



Equipment; baju berlisensi internasional yakni Walt Disney, Warner Bros, Those Characters From Cleveland, Inc., Sanrio dan Mister Men Limited), pakaian jadi pesanan khusus pembeli, baik untuk pasar luar negeri maupun dalam negeri, seperti baju tidur, pakaian dalam wanita, t-shirt dan polo shirt. 2). Benang rajut yang terdiri dari benang rajut katun dan TC dengan variasi dalam berbagai ukuran.

#### 6. Trisula Internasional Tbk

Trisula International Tbk (sebelumnya PT Trisula Global Fashion) (TRIS) didirikan tanggal 13 Desember 2004 dengan nama PT Transindo Global Fashion dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 2005. Kantor pusat TRIS berkedudukan di Gedung Trisula Center, Jln. Lingkar Luar Barat Blok A No. 1, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat 11740 – Indonesia.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan TRIS antara lain menjalankan usaha dalam bidang perdagangan pakaian jadi (garmen), industri garmen, industri tekstil serta usaha terkait lainnya. Trisula dan anak usahanya memproduksi pakaian jadi dan memiliki gerai penjualan (sales outlet) milik sendiri dan secara konsinyasi melalui kerja sama dengan retailer di beberapa pusat perbelanjaan yang tersebar di hampir seluruh kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, dan Balikpapan.

#### 7. Supreme Cable Manufacturing Corporation Tbk

Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk (SUCACO Tbk) (SCCO) didirikan 09 Nopember 1970 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 2 Oktober 1972. Kantor pusat SUCACO berlokasi di Jln. Kebon Sirih 71, Jakarta 10340 sedangkan pabrik berlokasi di beberapa tempat, yaitu di jalan Daan Mogot, Km.16, Jakarta Barat, Jalan Raya Perjuangan Km 2, Bekasi, Jalan Raya Cikarang Cibarusah Km 7,5 No. 20A, Cikarang dan Jalan Kalisabi No. 61, Tangerang.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan SUCACO adalah memproduksi bermacam-macam kabel (kabel listrik, kabel telekomunikasi dan kawat Enamel), produk-produk yang berhubungan berikut bahan bakunya, dan segala macam produk melamin, serta menjual produk-produk tersebut di dalam negeri (lokal) dan luar negeri (ekspor).

### **4.1.2. Perbandingan Leverage (DER) dan Ukuran Perusahaan (Size) Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri**

#### 1. *Leverage*

*Leverage* merupakan rasio yang menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun aset. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal (*equity*). Perusahaan yang baik mestinya memiliki komposisi modal yang lebih besar dari utang.

Adapun rumus *Debt to Equity Ratio* adalah:

$$Debt\ to\ Equity\ Ratio = \frac{Total\ Liabilities}{Total\ Equity}$$

Berikut hasil perhitungan Leverage pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.

**Tabel 8.**

*Debt to Equity Ratio* (DER) Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016

No	Emiten	Debt to Equity Ratio				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	ASII	1,03	1,02	0,96	0,94	0,87
2	AUTO	0,62	0,32	0,42	0,41	0,39
3	NIPS	1,45	2,38	1,10	1,54	1,11
4	RICY	1,30	1,34	1,95	1,99	2,12
5	SCCO	1,27	1,49	1,03	0,92	1,01
6	SMSM	0,76	0,69	0,53	0,54	0,43
7	TRIS	0,51	0,59	0,69	0,74	0,85
	Mean	0,99	1,12	0,95	1,01	0,97
	Max	1,45	2,38	1,95	1,99	2,12
	Min	0,51	0,32	0,42	0,41	0,39

(Sumber : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) diolah oleh penulis, tahun 2018)

Tabel 8. menunjukkan *leverage* untuk rata-rata (*mean*) perusahaan sektor aneka industri pada tahun 2012 sebesar 0,99. Pada tahun 2012 perusahaan dengan tingkat *leverage* terendah dengan nilai DER sebesar 0,51 adalah Trisula Internasional Tbk (TRIS). Kemudian untuk perusahaan dengan tingkat *leverage* tertinggi dengan nilai DER sebesar 1,45 adalah Nipress Tbk (NIPS).

Pada tahun 2013 nilai rata-rata DER naik menjadi 1,12 atau mengalami kenaikan sebesar 0,13 jika dibandingkan dengan tahun 2012 artinya ketujuh perusahaan manufaktur sektor aneka industri mengalami kenaikan 13% dalam penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap (*fixed rate of return*). Nilai DER terendah sebesar 0,32 dihasilkan oleh Astra Otoparts Tbk (AUTO), dan nilai DER tertinggi sebesar 2,38 dihasilkan oleh Nipress Tbk (NIPS).

Pada tahun 2014 nilai rata-rata DER menurun menjadi 0,95 atau mengalami penurunan sebesar 0,17 jika dibandingkan dengan tahun 2013 artinya ketujuh perusahaan manufaktur sektor aneka industri mengalami penurunan sebesar 17% dalam penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap (*fixed rate of return*). Nilai DER terendah sebesar 0,42 dihasilkan oleh Astra Otoparts Tbk (AUTO).

Sedangkan nilai DER tertinggi sebesar 1,95 dihasilkan oleh Ricky Putra Globalindo Tbk (RICY).

Pada tahun 2015 nilai rata-rata DER kembali naik menjadi 1,01 atau mengalami kenaikan sebesar 0,06 jika dibandingkan dengan tahun 2014 artinya ketujuh perusahaan manufaktur sektor aneka industri mengalami kenaikan sebesar 6% dalam penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap (*fixed rate of return*). Nilai DER terendah sebesar 0,41 dihasilkan oleh Astra Otoparts Tbk (AUTO), dan nilai DER tertinggi sebesar 1,99 dihasilkan oleh Ricky Putra Globalindo Tbk (RICY).

Pada tahun 2016 nilai rata-rata DER mengalami penurunan kembali menjadi 0,86 atau mengalami penurunan sebesar 0,07 jika dibandingkan dengan tahun 2015 artinya kesepuluh perusahaan manufaktur sektor aneka industri mengalami penurunan sebesar 7% dalam penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap (*fixed rate of return*). Nilai DER terendah sebesar 0,39 dihasilkan oleh Astra Otoparts Tbk (AUTO), sedangkan pada nilai DER tertinggi sebesar 2,12 dihasilkan oleh Ricky Putra Globalindo Tbk (RICY).

## 2. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinyatakan dengan total aktiva atau total penjualan bersih. Semakin besar total aktiva maupun penjualan maka semakin besar pula ukuran suatu perusahaan. Semakin besar aktiva maka semakin besar modal yang ditanam, sementara semakin banyak penjualan maka semakin banyak juga perputaran uang dalam perusahaan. Dengan demikian, ukura perusahaan merupakan ukuran atau besarnya asset yang dimiliki oleh perusahaan.

Adapun rumus Ukuran Perusahaan (*Size*) adalah:

$$\text{Firm size} = \text{Logaritma Natural} \times \text{Total Asset} \\ \text{atau Ln (Total Aset)}$$

Berikut hasil perhitungan Ukuran Perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.

**Tabel 9.**

Ukuran Perusahaan (*Firm Size*) Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016

No	Emiten	LN (Total Aset) = SIZE				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	ASII	12,11	12,27	12,37	12,41	11,03
2	AUTO	16,00	16,35	16,48	16,48	16,50
3	NIPS	26,99	20,50	20,91	21,16	21,30
4	RICY	27,46	27,49	27,79	27,81	27,88

5	SCCO	28,03	28,20	28,14	28,20	28,53
6	SMSM	28,00	28,16	14,37	14,61	14,63
7	TRIS	26,63	2683	26,98	27,08	27,18
	Mean	23,60	22,83	21,01	21,11	21,01
	Max	28,03	28,20	28,14	28,20	28,53
	Min	12,11	12,27	12,37	12,41	11,03

(Sumber : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) diolah oleh penulis, tahun 2018)

Berdasarkan tabel 9. Menyatakan bahwa pada hasil dari Ukuran perusahaan (*firm size*) pada perusahaan sektor aneka industri mengalami fluktuasi yang tidak terlalu tinggi selama tahun 2012 sampai dengan 2016. Nilai rata-rata *firm size* pada tahun 2012 sebesar 23,60, perusahaan dengan nilai *firm size* terendah pada tahun 2012 dengan nilai 12,11 dihasilkan oleh Astra International (ASII), sedangkan pada nilai terendah *firm size* sebesar 28,03 dihasilkan oleh Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk (SCCO).

Pada tahun 2013 hasil rata-rata *firm size* sebesar 22,83 hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata *firm size* mengalami penurunan sebesar 0,77 jika dibandingkan dengan tahun 2012. Nilai *firm size* terendah pada tahun 2013 sebesar 12,27 dihasilkan oleh Astra International (ASII), sedangkan nilai *firm size* tertinggi sebesar 28,20 dihasilkan oleh Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk (SCCO).

Pada tahun 2014 hasil rata-rata *firm size* sebesar 21,01 hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata *firm size* mengalami penurunan sebesar 1,82 jika dibandingkan dengan tahun 2013. Nilai *firm size* terendah pada tahun 2014 sebesar 12,37 dihasilkan oleh Astra International (ASII), sedangkan nilai *firm size* tertinggi sebesar 28,14 dihasilkan oleh Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk (SCCO).

Pada tahun 2015 hasil rata-rata *firm size* sebesar 21,11 hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata *firm size* mengalami kenaikan yang tidak terlalu tinggi sebesar 0,1 jika dibandingkan dengan tahun 2014. Nilai *firm size* terendah pada tahun 2015 sebesar 12,41 dihasilkan oleh Astra International (ASII), sedangkan nilai *firm size* tertinggi sebesar 28,20 dihasilkan oleh Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk (SCCO).

Pada tahun 2016 hasil rata-rata *firm size* sebesar 21,01 hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata *firm size* mengalami penurunan yang tidak terlalu tinggi yaitu sebesar 0,1 jika dibandingkan dengan tahun 2015. Nilai *firm size* terendah pada tahun 2016 sebesar 11,03 dihasilkan oleh Astra International (ASII), sedangkan nilai *firm size* tertinggi sebesar 28,53 dihasilkan oleh Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk (SCCO).

### 3. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah pengaturan untuk meminimumkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya. *Tax Avoidance* bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan dan meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak.

**Tabel 10.**

Penghindaran Pajak (CETR) Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016

No	Emiten	CETR				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	ASII	0,20	0,23	0,20	0,33	0,24
2	AUTO	0,16	0,20	0,26	0,48	0,28
3	NIPS	0,27	0,32	0,35	0,44	0,25
4	RICY	0,28	0,40	0,55	0,44	0,45
5	SCCO	0,19	0,36	0,24	0,21	0,36
6	SMSM	0,25	0,20	0,25	0,26	0,21
7	TRIS	0,20	0,27	0,45	0,32	0,42
	Mean	0,22	0,28	0,33	0,35	0,31
	Max	0,28	0,40	0,55	0,48	0,45
	Min	0,16	0,20	0,20	0,21	0,21

(Sumber : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) diolah oleh penulis, tahun 2018)

Pada tabel 10. Menyatakan bahwa pada perkembangan penghindaran pajak selama tahun 2012-2016 cenderung mengalami fluktuatif. Pada tahun 2012 nilai rata-rata dari penghindaran pajak dengan indikator *Cash Effective tax rate* (CETR) sebesar 0,22. Sementara nilai terendah ETR sebesar 0,16 diperoleh dari Astra Otoparts Tbk (AUTO), dan nilai ETR tertinggi sebesar 0,28 diperoleh dari Ricky Putra Globalindo Tbk (RICY).

Pada tahun 2013 nilai rata-rata dari CETR mengalami kenaikan sebesar 0,06 menjadi 0,28 hal ini dapat dilihat jika dibandingkan dengan nilai CETR 2012. Sedangkan nilai CETR terendah pada tahun 2013 sebesar 0,20 diperoleh dari Astra Otoparts Tbk (AUTO) dan nilai CETR tertinggi diperoleh dari Ricky Putra Globalindo Tbk (RICY).

Di tahun 2014 nilai rata-rata dari CETR mengalami kenaikan sebesar 0,05 menjadi 0,33 hal ini dapat dilihat jika dibandingkan dengan nilai CETR 2013. Sedangkan nilai ETR terendah di tahun 2014 sebesar 0,20 diperoleh dari Astra International (ASII), dan nilai CETR tertinggi sebesar 0,55 diperoleh dari Ricky Putra Globalindo Tbk (RICY).

Pada tahun 2015 nilai rata-rata dari CETR mengalami kenaikan sebesar 0,02 menjadi 0,35. Sedangkan nilai CETR terendah pada tahun 2015 sebesar 0,21 diperoleh dari Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk (SCCO) dan nilai CETR tertinggi sebesar 0,48 diperoleh dari Astra Otoparts Tbk (AUTO).

Dan di tahun 2016 nilai rata-rata dari CETR mengalami penurunan kembali sebesar 0,04 menjadi 0,31. Sedangkan nilai CETR terendah pada tahun 2016 sebesar 0,21 diperoleh dari Selamat Sempurna Tbk (SMSM) dan nilai CETR tertinggi sebesar 0,45 diperoleh dari Ricky Putra Globalindo Tbk (RICY).

#### 4.2. Analisis Data

Pengujian “Pengaruh *Leverage* dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia” dilakukan dengan pengujian statistik. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) Versi 23. Beberapa pengujian dilakukan yaitu uji asumsi klasik (uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi), uji hipotesis (uji koefisien determinasi, uji koefisien secara bersama-sama atau uji F, uji koefisien secara parsial atau uji t). Adapun variabel yang diteliti yaitu *Leverage* dengan indikator liabilitas dibagi dengan ekuitas (X1), Ukuran Perusahaan dengan indikator Ln(Total Asset) (X2) dan Penghindaran Pajak dengan indikator beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Y).

##### 4.2.1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

**Tabel 11.**  
Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DER	35	32,00	238,00	100,8857	52,22450
SIZE	35	1437,00	2853,00	2388,4571	502,57264
ETR	35	16,00	55,00	30,0571	9,97333
Valid N (listwise)	35				

(Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 23, Tahun 2018)

Pada tabel 11. berdasarkan jumlah sampel yang diteliti sebanyak 7 perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan tahunn pengamatan selama 5 periode dengan jumlah data keseluruhan N=35. Dari hasil tabel diatas dalam Analisis Statistik Deskriptif diketahui hasil dari *Leverage* dengan indikator liabilitas dibagi dengan ekuitas memiliki nilai terendah 32,00 dan nilai tertinggi 238,00. Sedangkan nilai rata-rata sebesar 100,8857 dan nilai standar deviasi 52,22450.

Nilai ukuran perusahaan (*Size*) sebagai variabel independen menunjukkan nilai terendah 1437,00 dan nilai tertinggi 2853,00. Sedangkan nilai rata-rata 2388,4571 dan nilai standar deviasi sebesar 502,57264.

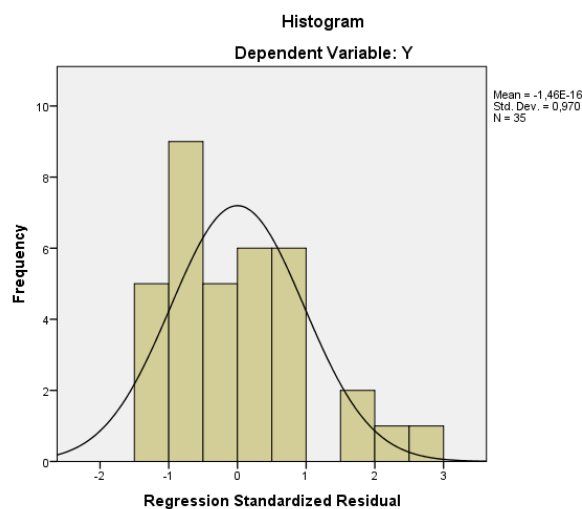
Penghindaran pajak dengan indikator *Cash Effective Tax Rate* (Beban pajak / laba sebelum pajak). Sebagai variabel dependen memiliki nilai terendah 16,00 dan nilai tertinggi 55,00. Sedangkan nilai rata-rata 30,0571 dan nilai standar deviasi 9,97333.

#### 4.2.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan layak untuk dianalisis atau tidak, karena tidak semua data dapat dianalisis dengan regresi. Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data sekunder ini, maka peneliti melakukan uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedasitas, uji autokorelasi.

##### 1. Uji Normalitas

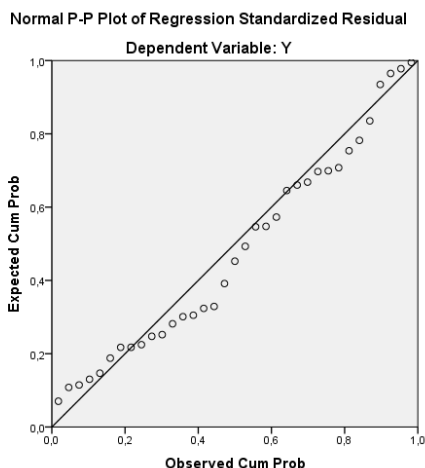
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t atau uji f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Metode yang digunakan adalah grafik histogram dan Normal Probability Plot (P-P Plot), (Imam Ghozali, 2016:154). Hasil pengujian grafik dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3  
Hasil Uji Normalitas dengan Grafik Histogram

(Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 23, Tahun 2018)

Dari gambar grafik diatas dapat dilihat bahwa grafik tersebut berbentuk lonceng, artinya data residual terdistribusi dengan normal.



Gambar 4

### Hasil Uji Normalitas dengan Grafik P-Plot

(Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 23, Tahun 2018)

Pada *normal probability plot* terlihat titik-titik (data) menyebar disekitar garis diagonal (normal) serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal (normal). Selain metode grafik penelitian ini juga menggunakan analisis statistik untuk menguji normalitas data. Analisis statistik yang digunakan untuk menguji normalitas data adalah menggunakan kolmogorov-Smirnov. Dengan uji ini dapat diketahui sampel yang diamati terdistribusi secara normal atau tidak. Jika data tersebut mempunyai level of significance atau diatas 5% ( $\alpha \geq 0,05$ ) maka data tersebut terdistribusi secara normal. Sedangkan jika kurang dari 5% ( $\alpha \leq 0,05$ ) maka data tersebut tidak terdistribusi secara normal.

Tabel 12.

### Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	8,74390680
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,133
	Positive	,133
	Negative	-,073
Test Statistic		,133
Asymp. Sig. (2-tailed)		,120 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.



Tabel 12 menunjukkan nilai signifikansi yang diperoleh yaitu 0,120 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 atau  $0,120 > 0,05$  maka nilai terdistribusi normal dan memenuhi syarat uji normalitas.

## 2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi masalah multikolinearitas dalam penelitian ini dengan menggunakan nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Apabila nilai *tolerance*  $\geq 0,10$  dan nilai VIF  $\leq 10$  maka regresi terbebas dari masalah multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas adalah sebagai berikut:

**Tabel 13.**  
Uji Multikolinearitas

### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	21,887	7,510		2,914	,006		
DER	,094	,033	,493	2,843	,008	,799	1,251
SIZE	-,001	,003	-,028	-,161	,873	,799	1,251

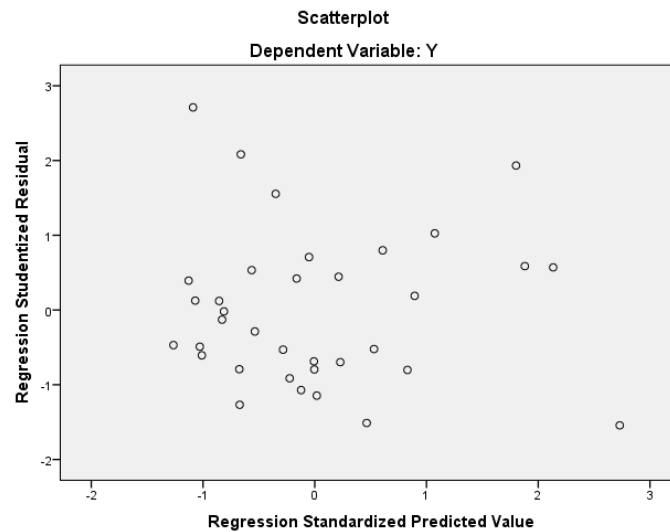
a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

(Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 23, Tahun 2018)

Berdasarkan tabel 13. hasil dari uji multikolinearitas dapat dilihat pada kolom *Collinearity Statistics* bahwa nilai *tolerance* DER dan nilai *tolerance* SIZE sebesar 0,799, yang artinya  $0,799 \geq 0,10$ . Dan nilai VIF DER dan nilai VIF SIZE sebesar 1,251, yang artinya  $1,251 \leq 10$ . Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model regresi penelitian ini terbebas dari gejala multikolinearitas.

## 3. Uji Heterokedastisitas

Menurut Imam Ghozali (2016: 134) mengatakan bahwa uji heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedasitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedasitas atau tida terjadi heteroskedasitas. Uji Heterokedastisitas dilakukan dengan melihat pola titik-titik pada scatterplots regresi. Jika titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas maka tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Hasil dari uji heterokedastisitas disajikan pada gambar berikut :



**Gambar 5**  
Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Scatterplot

Gambar 5. menunjukkan scatterplot terlihat bahwa titik-titik pada grafik menyebar dengan pola yang tidak jelas, maka tidak terjadi masalah heterokedastisitas pada model regresi.

#### 4. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena obsevrasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.

**Tabel 14.**

Pengambilan Keputusan Ada atau Tidaknya Autokorelasi

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	No Decision	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4-dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	No Decision	$4-du \leq d \leq 4-dl$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	Tidak Ditolak	$du < d < 4-du$

(Sumber : Imam Ghozali, 2016).

Adapun hasil pengujian autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW test) yaitu disajikan sebagai berikut :

**Tabel 15.**  
Hasil Uji Autokorelasi Menggunakan Uji Durbin-Watson (DW test)

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,481 <sup>a</sup>	,231	,183	9,01301	1,443

a. Predictors: (Constant), SIZE, DER

b. Dependent Variable: ETR

Tabel 15. menunjukkan nilai Durbin Watson (DW) sebesar 1,443 dengan (k, n) jadi (2,35) dimana k adalah jumlah variabel independen dan n adalah data observasi. Maka dengan taraf signifikansi 0,05 diperoleh nilai dL dan du yaitu dL sebesar 1,3433, du sebesar 1,5838. Hasil uji menggunakan Durbin-Watson menunjukkan ( $1,3433 \leq 1,443 \leq 1,5838$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi positif.

#### 4.2.3. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur pengaruh atau hubungan variabel independen dengan variabel dependen.

Berikut hasil analisis regresi pada tabel berikut :

**Tabel 16.**  
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	21,887	7,510		2,914	,006		
	DER	,094	,033	,493	2,843	,008	,799	1,251
	SIZE	-,001	,003	-,028	-,161	,873	,799	1,251

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Model persamaan analisis regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1.X_1 + b_2.X_2 + \dots + e$$

$$Y = 21,887 + 0,094 \text{ DER} - 0,001 \text{ SIZE} + e$$

Dimana:

Y = penghindaran pajak

a = Konstanta

b<sub>1</sub> = Koefisien regresi untuk Debt to equity ratio

X<sub>1</sub> = *Leverage*

b<sub>2</sub> = Koefisien regresi untuk total aset

X<sub>2</sub> = Ukuran Perusahaan

e = *Error*

Dari persamaan model regresi linier berganda tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta

Konstanta sebesar 21,887 artinya jika Leverage dan Ukuran Perusahaan nilainya adalah 0, maka penghindaran pajaknya sebesar 21,887.

2. Koefisien Regresi Variabel Leverage

Nilai koefisien regresi variabel leverage yang diukur dengan debt to equity ratio (DER) bernilai positif, yaitu sebesar 0,094. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan DER sebesar satu satuan maka dapat mengakibatkan naiknya penghindaran pajak (ETR) sebesar 0,094 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya dalam model regresi ini nilainya tetap.

3. Koefisien Regresi Variabel Ukuran Perusahaan

Nilai koefisien regresi variabel ukuran perusahaan yang diukur dengan firm size bernilai positif, yaitu sebesar -0,001. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan firm size sebesar satu satuan maka dapat mengakibatkan naiknya penghindaran pajak (ETR) sebesar -0,001 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya dalam model regresi ini nilainya tetap.

#### 4.2.4. Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis bertujuan untuk menjawab sementara mengenai rumusan masalah yang belum dibuktikan kebenarannya. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda (multiple regression analysis), yaitu dilakukan melalui analisis uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji koefisien regresi secara parsial bersama-sama (uji t) dan uji koefisien regresi secara bersama-sama (uji f).

1. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil pengujian koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 17.**

Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,481 <sup>a</sup>	,231	,183	9,01301	1,443

a. Predictors: (Constant), SIZE, DER

b. Dependent Variable: ETR

(Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 23, Tahun 2018)

Tabel 17 menunjukkan hasil uji koefisien determinasi yang terdiri dari nilai korelasi berganda (R), koefisien (R square), koefisien determinasi yang disesuaikan (Adjusted R Square) dan ukuran kesalahan prediksi (Std Error of the Estimate).

R square ( $R^2$ ) menunjukkan nilai koefisien determinasi yaitu persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen jika dalam regresi menggunakan tidak lebih dari dua variabel independen. Nilai R Square sebesar 0,231 yaitu berarti bahwa variabel independen (Leverage dan Ukuran Perusahaan) mempengaruhi variabel dependen (Penghindaran Pajak) sebesar 23,1% dan sisanya sebesar 76,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

*Adjusted R Square* adalah *R Square* yang telah disesuaikan yaitu persentase sumbangan variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,183.

*Standar Error of the Estimate* adalah ukuran kesalahan prediksi. Kesalahan dapat terjadi dalam memprediksi Penghindaran Pajak sebesar 9,01301.

## 2. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji Statistik t)

Uji t atau uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial setia variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Koefisien regresi masing-masing variabel independen dikatakan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen jika t hitung kurang dari  $-t$  tabel ( $t_{hitung} < t_{tabel}$ ) atau t hitung lebih besar dari t tabel ( $t_{hitung} > t_{tabel}$ ). Nilai t tabel dicari pada signifikansi  $0,05/2 = 0,025$  (uji dua sisi) dengan  $df = n-k-1$  atau  $df = 35-2-1 = 32$ . Hasil dari uji t disajikan pada tabel 18.

**Tabel 18.**

Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	21,887	7,510		2,914	,006		
DER	,094	,033	,493	2,843	,008	,799	1,251
SIZE	-,001	,003	-,028	-,161	,873	,799	1,251

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

(Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 23, Tahun 2018)

Analisis uji t berdasarkan tabel adalah sebagai berikut :

### a. Leverage terhadap ( $X_1$ ) terhadap Penghindaran Pajak (Y)

Leverage ( $X_1$ ) memiliki nilai signifikansi 0,008 kurang dari taraf nyata 0,05 atau ( $0,008 < 0,05$ ). Dan untuk membandingkan antara t hitung dengan t tabel, dimana nilai t hitung sebesar 2,843 dan t tabel yaitu sebesar 2,03693 maka ( $t_{hitung} >$

$t_{tabel}$ ) ( $2,843 > 2,03693$ ) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,008 kurang dari taraf nyata 0,05 atau ( $0,008 < 0,05$ ). Maka dari itu leverage secara parsial berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

b. Ukuran Perusahaan ( $X_2$ ) terhadap Penghindaran Pajak ( $Y$ )

Ukuran Perusahaan ( $X_2$ ) terlihat bahwa nilai  $t_{hitung}$  sebesar -0,161 dan  $t_{tabel}$  sebesar 2,03693 maka ( $t_{hitung} < t_{tabel}$ ) ( $-0,161 < 2,03693$ ) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,873 lebih dari taraf nyata 0,05 atau ( $0,873 > 0,05$ ). Maka dari itu ukuran perusahaan secara parsial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### 3. Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen.

Tabel 19.  
Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	782,385	2	391,192	4,816	,015 <sup>b</sup>
	Residual	2599,501	32	81,234		
	Total	3381,886	34			

a. Dependent Variable: ETR

b. Predictors: (Constant), SIZE, DER

Berdasarkan hasil pengujian signifikansi simultan (Uji F) diperoleh hasil  $F_{hitung}$  adalah sebesar 4,816 dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%,  $\alpha = 5\%$ , dfl (jumlah variabel-1) atau  $3-1=2$ , dan df2 ( $n-k-1$ ) atau  $35-2-1 = 32$  ( $n$  adalah jumlah data observasi, dan  $k$  adalah jumlah variabel independen), sehingga diperoleh  $F_{tabel}$  sebesar 3,29 atau  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $4,816 > 3,29$ ). Nilai signifikansi sebesar 0,015 yang kurang dari taraf nyata 0,05 atau ( $0,015 < 0,05$ ). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen yaitu *Leverage* dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

## 4.3. Pembahasan

### 4.3.1. Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Pada hasil pengujian bahwa Leverage yang menggunakan indikator Debt to Equity Ratio ( $X_1$ ) terlihat bahwa nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,843 dan  $t_{tabel}$  sebesar 2,03693 maka ( $t_{hitung} > t_{tabel}$ ) ( $2,843 > 2,03693$ ) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,008

kurang dari taraf nyata 0,05 atau ( $0,008 < 0,05$ ). Sehingga Hipotesis 1 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

#### **4.3.2. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia**

Pada hasil pengujian bahwa ukuran perusahaan yang menggunakan indikator *Firm Size* (X2) terlihat bahwa nilai  $t_{hitung}$  sebesar -0,161 dan  $t_{tabel}$  sebesar 2,03693 maka ( $t_{hitung} > t_{tabel}$ ) ( $-0,161 < 2,03693$ ) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,873 lebih dari taraf nyata 0,05 atau ( $0,873 > 0,05$ ). Sehingga Hipotesis 2 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

#### **4.3.3. Pengaruh Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia**

Hasil pengujian bahwa Leverage dan Ukuran Perusahaan terlihat bahwa nilai  $F_{hitung}$  sebesar 4,816 dan  $F_{tabel}$  sebesar 3,29 maka ( $F_{hitung} > F_{tabel}$ ) ( $4,816 > 3,29$ ) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,015 kurang dari taraf nyata 0,05 atau ( $0,015 < 0,05$ ). Sehingga Hipotesis 3 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Leverage dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### **4.4. Interpretasi Hasil Penelitian**

Dengan dilakukannya pengujian hipotesis dan statistik oleh penulis pada sepuluh perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016 dengan menggunakan alat bantu SPSS versi 23 tentang pengaruh leverage dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, maka penulis menginterpretasikan hasil penelitian yang diperkuat dengan teori-teori yang ada dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya sebagai berikut:

#### **4.4.1. Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak**

Berdasarkan hasil penelitian ini, leverage dengan indikator Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan pengujian statistik pada uji t dimana nilai signifikansi 0,008 kurang dari taraf nyata 0,05 atau ( $0,008 < 0,05$ ) dan nilai dari ( $t_{hitung} < t_{tabel}$ ) ( $2,843 > 2,03693$ ).

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin banyak penggunaan utang dalam membiayai kegiatan perusahaan maka semakin rendah pajak perusahaannya. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki utang tinggi akan mendapatkan insentif pajak berupa potongan atas bunga pinjaman sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 tahun 2008 sehingga perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi dapat melakukan penghematan pajak dengan menambah utang guna memperoleh insentif pajak yang besar (Eva Musyarofah, 2016)

Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Annisa Fadilla Rachmithasari, 2015) yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh terhadap tax avoidance. Secara logika, semakin tinggi nilai dari rasio Leverage, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin tinggi nilai utang perusahaan maka nilai ETR perusahaan akan semakin rendah.

#### **4.4.2. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak**

Berdasarkan hasil penelitian ini, ukuran perusahaan dengan ini Pada hasil pengujian bahwa ukuran perusahaan yang menggunakan indikator Firm Size tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Terlihat bahwa nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $-0,161$  dan  $t_{tabel}$  sebesar  $2,03693$  maka ( $t_{hitung} < t_{tabel}$ ) ( $-0,161 < 2,03693$ ) dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,873$  lebih dari taraf nyata  $0,05$  atau ( $0,873 > 0,05$ ).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Annisa Fadilla Rachmithasari, 2015) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dan membayar kewajibannya dibanding perusahaan dengan total aktiva yang kecil, sehingga semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang, sehingga tidak perlu melakukan tax avoidance.

#### **4.4.3. Pengaruh Variabel Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.**

Berdasarkan hasil uji secara simultan (Uji F) bahwa variabel independen dalam penelitian ini, yaitu Leverage ( $X_1$ ) dan Firm size ( $X_2$ ) secara simultan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan semakin tinggi nilai Leverage dan Firm size maka semakin memungkinkan terjadinya tindakan penghindaran pajak dan jika nilai Leverage dan Firm size menurun maka tindakan penghindaran pajak akan menurun. Penelitian ini sejalan dengan (Kurniasih & Sari, 2013), (Ngadiman & Puspitasari, 2014) dan (Eva Musyarofah) yang menyatakan bahwa leverage dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.



## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Untuk dapat memperoleh bukti empiris pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan analisa data dan pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat diketahui bahwa leverage yang diprosikan dengan Debt to equity ratio berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang diprosikan dengan Effective tax rate (ETR). Karena semakin tinggi nilai dari rasio Leverage, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin tinggi nilai utang perusahaan maka nilai ETR perusahaan akan semakin rendah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dengan yang dilakukan oleh Eva Musyrofah (2016) dan Annisa Fadilla Rachmithasari (2015), yang menyatakan bahwa leverage memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk dapat memperoleh bukti empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan analisa data dan pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat diketahui bahwa ukuran perusahaan yang diprosikan dengan Firm size tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang diprosikan dengan Effective tax rate (ETR). perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dan membayar kewajibannya dibanding perusahaan dengan total aktiva yang kecil, sehingga semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang, sehingga tidak perlu melakukan tax avoidance. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Ana Meliyana (2017) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan (firm size) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk dapat memperoleh bukti empiris pengaruh leverage dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan hasil (Uji F) bahwa leverage dan ukuran perusahaan secara simultan memiliki pengaruh

positif terhadap penghindaran pajak. Atau dengan kata lain adanya pengaruh yang kuat antara *leverage* dan ukuran perusahaan.

## **5.2.Saran**

Saran sebagai bahan masukan dan pertimbangan perusahaan adalah sebagai berikut :

### 1. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan ekonomi khususnya akuntansi perpajakan. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pengaruh *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

### 2. Bagi perusahaan

Bagi perusahaan, agar perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan lebih meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ana Meliyana (2017), Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Ttax Avoidance pada perusahaan Otomotif, Komponen, dan Kabel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015, Skripsi, Bogor, Fakultas Ekonomi, Universitas Pakuan.
- Anissa Fadilla Rachmithasari (2015), Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance, Skripsi, Surakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Chairil Anwar Pohan (2015), *Manajemen Keuangan*, Edisi Revisi, Jakarta, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama
- Dessy Mayangsari (2017), Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage dan Corporate Governance terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan, Skripsi, Bogor, Fakultas Ekonomi, Universitas Pakuan.
- Eva Musyarofah (2016), Pengaruh Derivatif Keuangan, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance), Skripsi, Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Fatimatus Zahra (2017), pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, dan Capital Intensity Terhadap Penghindan Pajak, Skripsi, Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Gusti Maya Sari (2014), Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan terhadap Tax Avoidance, Skripsi, Padang, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.
- Imam Ghozali (2016), *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Irham Fahmi (2013), *Analisis Laporan Keuangan*, Bandung, Penerbit Alfabeta.
- Kasmir (2010), *Analisis Laporan Keuangan*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir (2010), *Pengantar Manajemen Keuangan*, Edisi Pertama, cetakan kedua, Jakarta, Penerbit Prenada Media Group.
- Mardiasmo (2011), *Perpajakan Edisi Revisi*, Penerbit Andi.



Ngadiman & Christiany Puspitasari (2014), Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2012, Jurnal, Fakultas Ekonomi, Universitas Tarumanagara.

Qania Tsany Putri Nurul Ulfah (2017), Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Property dan Real Estate Periode 2011-2015), Skripsi, Bogor, Fakultas Ekonomi, Universitas Pakuan.

Tim Penyusun Pedoman Fakultas Ekonomi (2016), *Pedoman Skripsi Fakultas Ekonomi*, Bogor, Universitas Pakuan.

Thomas Sumarsan (2013). *Perpajakan Indonesia*, Edisi ketiga, Jakarta, Penerbit PT Indeks.

Tommy Kurniasih & Maria M. Ratna Sari (2013), Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fikal Pada Tax Avoidance, BULETIN STUDI EKONOMI, volume 18, No. 1, Februari 2013, Bali, Fakultas Ekonmi Universitas Udayana.

<https://www.idx.co.id>.

<https://www.sahamox.com>.

<https://www.Suara.com>

## LAMPIRAN

### ➤ Analisis Statistik Deskriptif

#### Descriptive Statistics

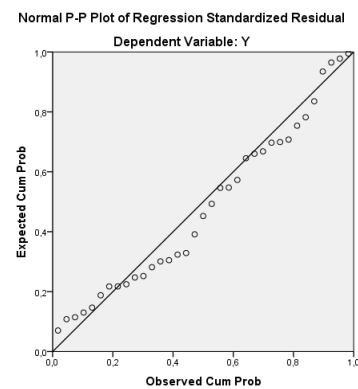
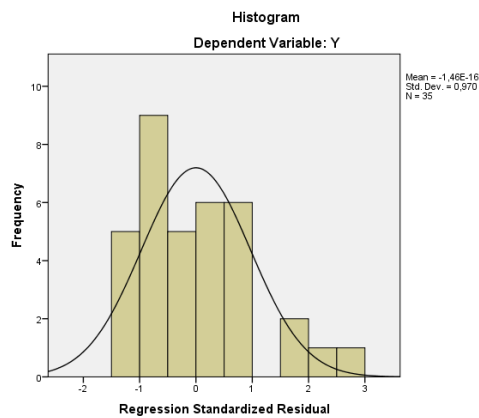
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DER	35	32,00	238,00	100,8857	52,22450
SIZE	35	1437,00	2853,00	2388,4571	502,57264
CETR	35	16,00	55,00	30,0571	9,97333
Valid N (listwise)	35				

### ➤ Uji Normalitas

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	8,74390680
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,133
	Positive	,133
	Negative	-,073
Test Statistic		,133
Asymp. Sig. (2-tailed)		,120 <sup>c</sup>

- a. Test distribution is Normal.  
 b. Calculated from data.  
 c. Lilliefors Significance Correction.



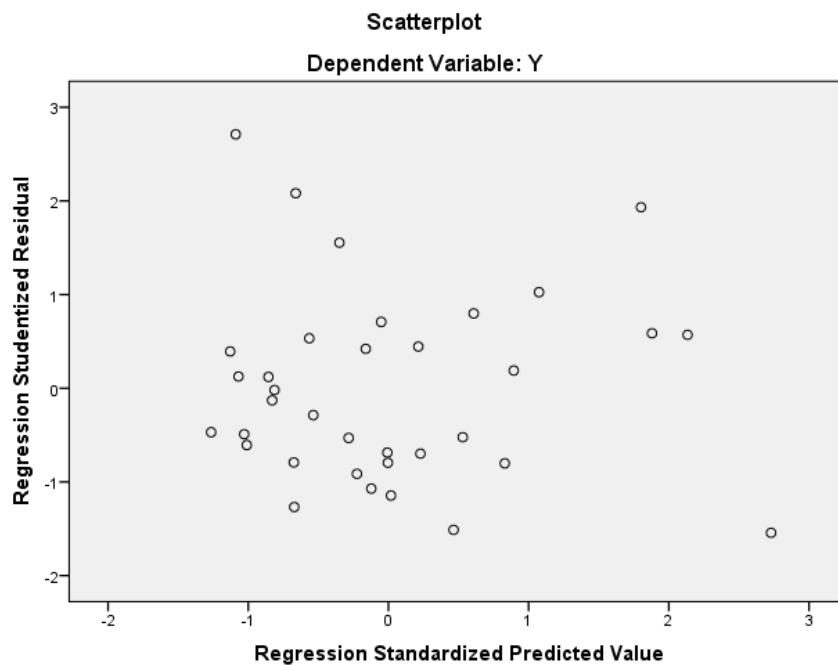
➤ Uji Multikolonieritas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	21,887	7,510		2,914	,006		
DER	,094	,033	,493	2,843	,008	,799	1,251
SIZE	-,001	,003	-,028	-,161	,873	,799	1,251

a. Dependent Variable: CETR

➤ Uji Heterokedastisitas



➤ Uji Autokorelasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,481 <sup>a</sup>	,231	,183	9,01301	1,443

a. Predictors: (Constant), SIZE, DER

b. Dependent Variable: CETR

➤ **Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,481 <sup>a</sup>	,231	,183	9,01301	1,443

a. Predictors: (Constant), SIZE, DER

b. Dependent Variable: CETR

➤ **Uji t**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	21,887	7,510		2,914	,006		
	DER	,094	,033	,493	2,843	,008	,799	1,251
	SIZE	-,001	,003	-,028	-,161	,873	,799	1,251

a. Dependent Variable: Y

➤ **Uji F**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	782,385	2	391,192	4,816	,015 <sup>b</sup>
	Residual	2599,501	32	81,234		
	Total	3381,886	34			

a. Dependent Variable: CETR

b. Predictors: (Constant), SIZE, DER

➤ **Analisis Regresi Berganda**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	21,887	7,510		2,914	,006		
	DER	,094	,033	,493	2,843	,008	,799	1,251
	SIZE	-,001	,003	-,028	-,161	,873	,799	1,251

a. Dependent Variable: CETR